

**PENGARUH KOMPETENSI, REGULASI, FAKTOR
POLITIK, AKUNTABILITAS, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI
(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

Jihan Fadivah Safitri

NIM. 19.52.21.268

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**PENGARUH KOMPETENSI, REGULASI, FAKTOR
POLITIK, AKUNTABILITAS, DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH DENGAN KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
SEBAGAI VARIABEL MEDIASI**

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

JIHAN FADIYAH SAFITRI
NIM.19.52.21.268

Surakarta, 26 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen pembimbing skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.
NIP. 19841008 201403 2 005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : JIHAN FADIYAH SAFITRI
NIM : 19.52.21.268
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "PENGARUH KOMPETENSI, REGULASI, FAKTOR POLITIK, AKUNTABILITAS, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 24 Mei 2023

METERAI
TEMPEL
60840AKK267497937
Jihan Fauziah

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : JIHAN FADIYAH SAFITRI
NIM : 19.52.21.268
JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "PENGARUH KOMPETENSI, REGULASI, FAKTOR POLITIK, AKUNTABILITAS, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)"

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari website perusahaan dan link lainnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Jihan Fadiyah Safitri

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Jihan Fadiyah Safitri NIM: 19.52.21.268 yang berjudul :

PENGARUH KOMPETENSI, REGULASI, FAKTOR POLITIK, AKUNTABILITAS, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)

Sudah di munaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Akuntansi syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasahkan dalam waktu dekat

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 26 Mei 2023
Dosen pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si.
NIP. 19841008 201403 2 005

PENGESAHAN
PENGARUH KOMPETENSI, REGULASI, FAKTOR POLITIK,
AKUNTABILITAS, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI
VARIABEL MEDIASI
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)

Oleh

JIHAN FADIYAH SAFITRI

NIM.19.52.21.268

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 M / 17 Dzulqa'dah 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)

Marita Kusuma Wardani, S.E., M.Si., Ak., C.A.

NIP. 19740302 200003 2 003



Penguji II

Fahri Ali Ahzar, M.Si

NIK. 19910513 201701 1 124



Penguji III

Aryani Intan Endah Rahmawati, S.E., M.Sc.

NIP. 19930521 201903 2 012



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTO

“Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Prosesnya mungkin ga mudah tapi endingnya bikin ga berhenti bilang alhamdulillah”

(From Tiktok)

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan”

(From Tiktok)

“Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat
menyelesaikan perkuliahan

Bapak dan Ibuku tercinta yang senantiasa memberikan doa dan limpahan kasih
sayang yang tak ternilai dan kakak serta adik saya yang selalu memberikan dukungan

Teman-temanku *since* 2019

Yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan sehingga karya ini dapat
terselesaikan

Terimakasih.....

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Regulasi, Faktor Politik, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Melalui Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Wonogiri)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Khairul Imam, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Syariah dan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Fitri Laela Wijayati, S.E., M.Si selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
5. Devi Narulitasari, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
6. Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, arahan serta kesabaran selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat untuk kedepannya bagi penulis.
8. Ibu dan Bapakku, terimakasih atas segala doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
9. Kakak serta adikku yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus.
10. Teman-teman dari Kost Hasan yang selalu membantu dan menemani serta memotivasi agar skripsi ini segera terselesaikan.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 Mei 2023

Penulis

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of competence, regulation, political factors, accountability, and internal control systems on local government performance with the quality of financial statements as a mediating variable. The independent variables used are competence, regulation, political factors, accountability, and internal control systems. The dependent variable used is local government performance. While the mediating variable in this study is the quality of financial statements.

The population in this study were all employees in 26 Regional Apparatus Organizations of Wonogiri Regency with a total of 8,802 people. The data in this study were obtained by questionnaire. The sampling technique used was purposive sampling. The sample in this study was 97 people with certain criteria. The data in this study were processed with SmartPLS.

The results of data analysis show that, competence, regulation, political factors, accountability, and internal control systems have a positive effect on local government performance. The quality of financial statements is able to mediate competence, regulation, political factors, accountability, and internal control systems on local government performance.

Keywords: *competence, regulation, political factors, accountability, internal control system, performance, quality of financial statements.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi, regulasi, faktor politik, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel mediasi. Variabel independen yang digunakan adalah kompetensi, reguasi, faktor politik, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja pemerintah daerah. Sedangkan variabel mediasi dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di 26 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri dengan jumlah 8.802 orang. Data pada penelitian ini diperoleh kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel pada penelitian ini adalah 97 orang dengan kriteria tertentu. Data dalam penelitian ini diolah dengan *SmartPLS*.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa, kompetensi, regulasi, faktor politik, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan mampu memediasi kompetensi, regulasi, faktor politik, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci : kompetensi, regulasi, faktor politik, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, kinerja, kualitas laporan keuangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1

1.2	Identifikasi Masalah	15
1.3	Batasan Masalah.....	15
1.4	Rumusan Masalah	16
1.5	Tujuan Penelitian	17
1.6	Manfaat Penelitian	18
1.7	Jadwal Penelitian.....	19
1.8	Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II LANDASAN TEORI		21
2.1	Kajian Teori	21
2.1.1	<i>Stewardship Theory</i>	21
2.1.2	<i>Agency Theory</i>	22
2.1.3	Kinerja	23
2.1.4	Kompetensi	25
2.1.5	Regulasi	26
2.1.6	Faktor Politik	27
2.1.7	Akuntabilitas.....	29
2.1.8	Sistem Pengendalian Internal	32

2.1.9	Kualitas Laporan Keuangan	34
2.2	Hasil Penelitian yang Relevan	36
2.3	Kerangka Berfikir.....	42
2.4	Hipotesis.....	43
2.4.1	Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	43
2.4.2	Pengaruh Regulasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	44
2.4.3	Pengaruh Faktor Politik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	45
2.4.4	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	47
2.4.5	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	49
2.4.6	Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	50
2.4.7	Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Regulasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	52
2.4.8	Pengaruh peran Kualitas Laporan keuangan dalam memediasi hubungan antara Faktor Politik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	53
2.4.9	Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	55

2.4.10 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Sistem Pengendalian Interal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian.....	58
3.2 Jenis Penelitian.....	58
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	58
3.3.1 Populasi	58
3.3.2 Sampel	59
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel	63
3.4 Data dan Sumber Data	63
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.6 Variabel Penelitian	64
3.7 Definisi Operasional Variabel.....	65
3.8 Teknik Analisis Data.....	68
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	72
4.1 Gambaran Umum Penelitian	72
4.1.1 Proses Penelitian.....	72

4.1.2	Deskripsi Karakteristik Responden	72
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data	76
4.2.1	Statistik Deskriptif	76
4.2.2	Pengujian Instrumen Penelitian Outer Model	79
4.2.3	Pengujian Instrumen Penelitian Inner Model	89
4.2.4	Pengujian Hipotesis	90
4.3	Pembahasan	94
4.3.1	Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja	94
4.3.2	Pengaruh Regulasi terhadap Kinerja	96
4.3.3	Pengaruh Faktor Politik terhadap Kinerja	97
4.3.4	Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja	99
4.3.5	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja	101
4.3.6	Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	103
4.3.7	Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Regulasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	104
4.3.8	Pengaruh peran Kualitas Laporan keuangan dalam memediasi hubungan antara Faktor Politik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	105

4.3.9 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	107
4.3.10 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Sistem Pengendalian Interal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	108
BAB V PENUTUP.....	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Keterbatasan.....	110
5.3 Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari laba atau rugi. Karena sifatnya yang nirlaba, keberhasilan suatu organisasi pemerintah juga harus diukur dari kinerjanya. Kinerja lembaga pemerintah sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas. Penerapan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan konsep akuntabilitas dan transparansi diharapkan dapat mengarah pada pengelolaan pemerintahan daerah yang baik untuk kepentingan rakyat (Jatmiko, 2020).

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran sejauh mana tujuan atau sasaran instansi pemerintah tercapai, sebagai gambaran visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang menunjukkan sejauh mana keberhasilan serta kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Edowai et al., 2021).

Istilah “kinerja” sudah sangat dikenal dalam implementasi tata kelola lembaga pemerintahan Indonesia saat ini, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal itu terlihat terutama sejak dikeluarkannya berbagai regulasi terkait reformasi pemerintahan (Nirwana & Haliah, 2018).

Dimensi reformasi sektor publik tidak hanya pada perubahan format kelembagaan, tetapi juga mencakup perombakan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berfungsinya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga cita-cita reformasi yaitu terciptanya *good governance* benar-benar tercapai (Afifi & Nugroho, 2018).

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk dari reformasi pemerintahan, bahwa diwajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*) yang telah ditetapkan (Nirwana & Haliah, 2018).

Pentingnya kinerja pemerintah daerah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan. Berbagai peraturan dan kebijakan pendukung lainnya juga telah dikeluarkan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 (PP Nomor 58 Tahun 2005), Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, dan PP No.6 Tahun 2008 (Nirwana & Haliah, 2018).

Setiap lembaga publik harus dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang hasil kerjanya, sehingga publik dapat meminta pertanggungjawaban. Tuntutan pertanggungjawaban penyelenggara atas amanah yang dipercayakan kepada mereka akan semakin meningkat. Sebagaimana diketahui, tujuan utama dari sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan publik (*publik service*), bukan untuk memaksimalkan laba (Azlina & Amelia, 2015).

Kinerja instansi pemerintah saat ini semakin mendapat perhatian dari masyarakat karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka terima dari pelayanan instansi pemerintah. Seringkali masyarakat tidak mengetahui pelayanan seperti apa yang sebenarnya diterima masyarakat sebagai warga negara dan bagaimana seharusnya pemerintah menyelenggarakan pelayanan untuk publik. Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah bagi publik sangat penting dilakukan demi tercapainya kepuasan kerja pada masyarakat (Azlina & Amelia, 2015).

Menurut Nirwana & Haliah (2018), berbagai upaya evaluasi terhadap pengelolaan kinerja dan akuntabilitas pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan hasil akhir yang kurang memuaskan. Fenomena tersebut yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang ditandai dengan munculnya berbagai tuntutan masyarakat terhadap peningkatan

pelayanan dan akuntabilitas pemerintah. Fenomena ini menimbulkan ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan.

Pemerintah daerah yang kinerja pertanggungjawabannya buruk tidak akan mendapat dana khusus untuk program pembangunan, pengairan, pembangunan jalan, dana desa dan lain-lain. Sebaliknya, pemerintah daerah yang mencapai hasil evaluasi yang baik akan mendapatkan alokasi dana tersebut. Pada hakekatnya, kinerja instansi adalah sejauh mana hasil suatu kegiatan di suatu instansi pemerintah tercapai dalam hal penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Azlina & Amelia, 2015).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, diantaranya yaitu kompetensi. Sumber daya manusia yang kompeten akan menghasilkan laporan keuangan serta kinerja yang berkualitas. Kompetensi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu institusi. Kehadiran pegawai yang berkompeten tentunya akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan berdampak pada kinerja pemerintah (Nirwana & Haliah, 2018).

Kompetensi diidentifikasi dengan mereka yang berkinerja lebih baik, lebih konsisten dan efektif daripada mereka yang rata-rata atau bahkan sama sekali tidak kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Kompetensi merupakan salah satu penentu tinggi rendahnya kinerja seseorang (Mulia & Saputra, 2021).

Semakin tinggi pegawai yang berkompeten, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan.

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah regulasi. Regulasi menjadi sangat penting karena menjadi dasar untuk memulai reformasi dalam organisasi pemerintah. Beberapa peraturan yang saling bertentangan berkontribusi pada buruknya kualitas laporan keuangan dan akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Kuasa et al., 2016).

Masalah lainnya adalah regulasi yang sering berubah. Peraturan-peraturan sebelumnya seringkali belum maksimal diterapkan ketika tiba-tiba terbit peraturan baru. Akibatnya, pemerintah tidak bisa menjalankan kebijakan secara maksimal. Suatu peraturan harus disesuaikan dengan kondisi daerah dalam bentuk peraturan daerah agar lebih mudah dalam pelaksanaannya (Nirwana & Haliah, 2018).

Dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada publik telah diterbitkan UU. No. 25/ 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur dan membangun kepercayaan masyarakat atas layanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, agar penyediaan layanan publik menjadi berkualitas serta memberi perlindungan kepada pengguna layanan, sesuai dengan norma dan asas hukum secara jelas (Idris & Konadi, 2012).

Jika regulasi diterapkan dengan benar, maka informasi yang diberikan kepada masyarakat/publik akan akurat (Kuasa et al., 2016). Semakin tinggi penerapan regulasi yang memadai, maka kinerja pemerintah yang dihasilkan akan semakin baik.

Faktor politik juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Faktor ini memiliki pengaruh yang besar karena fakta bahwa karakteristik khas sektor publik di Indonesia, khususnya pemerintah, sangat dipengaruhi oleh keadaan politik. Faktor politik dapat berupa intervensi politik di bidang keuangan dan ketidaksinergian antara lembaga politik dan proses politik dengan domain administrasi pemerintah (Nirwana & Haliah, 2018).

Politik organisasi sebagai proses yaitu setiap aktor atau kelompok dalam organisasi membangun kekuasaan untuk mempengaruhi penetapan tujuan, kriteria atau proses pengambilan keputusan organisasi dalam rangka memenuhi kepentingannya. Kepentingan-kepentingan itu sendiri adalah kepentingan pekerjaan, kepentingan karir, dan kepentingan ekstramural (Siswanto, 2007).

Berbagai perilaku politik yang berpotensi mempengaruhi pemerintah antara lain menahan informasi kunci dari pengambil keputusan, bergabung dengan koalisi, menyebarkan rumor, membocorkan informasi rahasia ke media, serta melobi untuk atau melawan kepentingan individu tertentu atau untuk keputusan alternatif (Nirwana & Haliah, 2018).

Faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah selanjutnya adalah akuntabilitas. Kinerja instansi pemerintah sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban oleh satu pihak kepada pihak lainnya (Jatmiko, 2020).

Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban bagi penyelenggara kegiatan pemerintahan untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan langkah-langkah dari segala keputusan dan proses yang dilakukan, serta mempertanggungjawabkan hasil kerjanya (Edowai et al., 2021). Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik.

Selanjutnya terdapat sistem pengendalian internal yang juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Pengendalian intern merupakan hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Fungsi pengendalian intern adalah membantu sumber daya manusia dalam memahami batasan dan hak dalam bekerja serta teknologi informasi apa yang dapat digunakan untuk memudahkan pekerjaannya (Yudhasena & Putri, 2019).

Pengendalian internal diperlukan agar lebih mudah untuk mendeteksi atau menganalisis masalah yang ada atau masalah yang mungkin timbul dalam proses pencapaian tujuan, sehingga kita dapat mengetahui dengan jelas apakah tujuan telah tercapai (Mokoginta et al., 2017). Dengan penerapan pengendalian intern

yang baik, maka pemerintah akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta kinerja pegawai yang baik.

Jika sumber daya manusia memiliki kompetensi yang baik maka laporan keuangan akan mengalami minim kekeliruan. Sebaliknya, kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Alminanda & Marfuah, 2018). Dengan adanya pegawai yang kompeten, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan akan berpengaruh terhadap tingginya kinerja. Pada penelitian Nirwana & Haliah (2018) terdapat hasil yang tidak signifikan antaran kompetensi terhadap kinerja, maka dibutuhkan peran mediasi untuk menjembatannya.

Semakin tinggi penerapan regulasi yang memadai, maka kinerja pemerintah yang dihasilkan melalui kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Hal ini dikarenakan semakin lengkapnya/tersedianya pelaksana sistem dan prosedur regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD maka akan menjadi lebih mudah menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akan berpengaruh terhadap tingginya kinerja (Kuasa et al., 2016). Menurut Nirwana & Haliah (2018) regulasi yang sering berubah-ubah dapat menyebabkan regulasi menjadi tidak berpengaruh terhadap kinerja, maka

dibutuhkan peran mediasi kualitas laporan keuangan untuk menjembatani antara regulasi terhadap kinerja.

Faktor politik berperan dalam menekankan organisasi dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan dengan cara memberikan tekanan kepada pejabat terkait organisasi tersebut dan menerapkan sebuah kebijakan yang berguna dalam upaya penerapan transparansi keuangan, dengan demikian penerapan transparansi dalam hal laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas kinerja melalui laporan keuangan (Zenita et al., 2021). Pada penelitian Nirwana & Haliah (2018) menyatakan bahwa perubahan organisasi yang dipengaruhi faktor politik akan mengakibatkan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi, khususnya terkait penerapan transparansi hanya akan bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi yang menyebabkan faktor politik tidak berpengaruh terhadap kinerja, maka dari itu diperlukan mediasi kualitas laporan keuangan untuk menjembatani hubungan antara faktor politik terhadap kinerja

Akuntabilitas yang terdefinisi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kejelasan transaksi data melalui pembuktian tertulis atas pencatatan yang dilakukan secara actual agar terhindar dari hal-hal yang bersifat curang (Sastra et al, 2015). Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas suatu perangkat daerah, maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik melalui kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan implementasi prinsip akuntabilitas akan mendorong nilai kualitas laporan keuangan menjadi meningkat dan berpengaruh terhadap

tingginya kinerja pemerintah daerah. Menurut penelitian Binawati & Badriyah (2022), para pegawai tidak akan terpengaruh dengan adanya akuntabilitas yang diberikan pemerintah daerah. Akuntabilitas akan berpengaruh pada masyarakat secara langsung, pemangku kepentingan dalam hal akuntabilitas adalah masyarakat. Tujuan akuntabilitas adalah suatu tindakan pertanggungjawaban untuk memberikan informasi dan mengungkap segala kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya publik, maka dibutuhkan peran mediasi kualitas laporan keuangan untuk menjembatani antara akuntabilitas terhadap kinerja.

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah (Mahmudi, 2011). Semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, maka pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akan mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah. Pada Rachman et al., (2022) menyatakan bahwa pengendalian internal sebenarnya dirancang untuk memberikan jaminan berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pada akhirnya, sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja dikarenakan hukum dan

peraturan yang ketat, maka dibutuhkan peran mediasi kualitas laporan keuangan untuk menjembatani antara sistem pengendalian internal terhadap kinerja.

Laporan keuangan dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian penting dalam menciptakan kinerja yang baik. Laporan keuangan adalah penyajian sistematis dari posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disampaikan harus berkualitas tinggi. Laporan keuangan berkualitas tinggi jika sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Irafah et al., 2020).

Laporan keuangan merupakan laporan keluaran (*output*) sedangkan masukannya (*input*) merupakan transaksi bisnis. Agar dapat dimasukkan dalam sistem pendaftaran, semua input harus disertai dengan bukti transaksi. Pelaporan keuangan yang akurat telah menjadi bagian penting dari akuntabilitas yang diharapkan dan dapat ditunjukkan. Laporan keuangan memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi (Ridzal, 2020).

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,40
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,15
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,08
4.	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	17,25

	Nilai Hasil Evaluasi	100	73,88
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber: Inspektorat Kabupaten Wonogiri

Tabel diatas menunjukkan Kabupaten Wonogiri meraih predikat BB atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang meraih nilai 73,17, meskipun mengalami peningkatan, nilai SAKIP Kabupaten Wonogiri masih berada di bawah Kabupaten Banyumas dengan nilai SAKIP 76,47 (Suara Banyumas, 2022).

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kinerja pemerintah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Binawati & Badriyah (2022) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, tetapi Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Edowai et al. (2021) pada penelitiannya menunjukkan hasil bahwa Akuntabilitas dan Transparansi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. Mulia & Saputra (2021), menunjukkan hasil bahwa kompetensi, lingkungan kerja, dan motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020) menyatakan bahwa Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Fitdina Aprianto et al. (2020) menyatakan Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara.

Utama (2020) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Pegawai berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja instansi Pemerintah. Hermawan (2019), menunjukan hasil bahwa kompetensi, pendelegasian wewenang, dan kepuasan kerja mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Novatiani et al. (2019) menyatakan bahwa Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Yudhasena & Putri (2019), menyatakan bahwa *Good Government Governance*, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Fiqri & Sari (2018) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian Damayanti & Hermanto (2018) menyatakan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya.

Penelitian Nirwana & Haliah (2018) dengan menambahkan kualitas laporan keuangan sebagai variabel *intervening* menyatakan bahwa kompetensi, regulasi, dan faktor politik tidak berpengaruh terhadap kinerja. Tetapi terdapat pengaruh positif tidak langsung yang signifikan antara kompetensi, regulasi, dan faktor politik terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan.

Idris & Konadi (2012) menyatakan bahwa ketersediaan anggaran dan regulasi dalam pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan aparatur. Berbagai penelitian tentang pengaruh politik dalam hubungan antara kualitas laporan keuangan dan kinerja dilakukan oleh Baber (1983) yang melakukan *explanatory research* untuk mengetahui pengaruh proses politik dalam keputusan untuk melaporkan informasi keuangan dalam laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor politik mempengaruhi keputusan terkait dalam informasi keuangan yang akan dilaporkan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Nirwana & Haliah (2018) yang berjudul “*Determinant factor of the quality of financial statements and performance of the government by adding contextual factors*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambahkan variabel akuntabilitas dari Jatmiko (2020) dan sistem pengendalian internal dari Yudhasena & Putri (2019).

Selain itu, penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan hasil penelitian dari Nirwana & Haliah (2018) yang menunjukkan hasil bahwa

kompetensi, regulasi, dan faktor politik tidak berpengaruh terhadap kinerja. Penelitian Binawati & Badriyah (2022) menyatakan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema “Pengaruh Kompetensi, Regulasi, Faktor Politik, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. SAKIP Kabupaten Wonogiri dengan nilai 73,88 masih berada di bawah Kabupaten Banyumas dengan nilai 76,47.
2. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya (*research gap*).

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki kefokusannya, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Penelitian ini hanya meneliti variabel kompetensi, regulasi, faktor politik, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, kinerja pemerintah daerah, dan kualitas laporan keuangan.

2. Penelitian ini hanya dilakukan di SKPD Kabupaten Wonogiri.
3. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas maka terdapat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
2. Apakah Regulasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
3. Apakah Faktor Politik berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
4. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
5. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
6. Apakah Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
7. Apakah Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Regulasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
8. Apakah Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Faktor Politik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?

9. Apakah Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
10. Apakah Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Regulasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh Faktor Politik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
4. Untuk menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
5. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Untuk menganalisis pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
7. Untuk menganalisis pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Regulasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

8. Untuk menganalisis pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Faktor Politik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
9. Untuk menganalisis pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
10. Untuk menganalisis pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian lanjutan yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah :

Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penentuan kebijakan terkait pengembangan kinerja Pemerintah Daerah.

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir.

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini disajikan kajian teori, review penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang berisi alur pengolahan data, jumlah populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum hasil penelitian yang dilakukan. Hasil analisis dengan metode penelitian yang digunakan serta uraian yang dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu guna diajukan penelitian sebagai bahan pertimbangan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Teori *Stewardship* berpendapat bahwa manajer, sebagai *steward*, lebih fokus pada kepentingan publik atau tujuan organisasi daripada keinginan pribadi. Teori ini mengasumsikan bahwa ada hubungan yang kuat antara kepuasan dan keberhasilan organisasi. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan sehingga fungsi utilitasnya maksimal (Yudhasena & Putri, 2019).

Teori *Stewardship* didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia bahwa seseorang dapat dipercaya dan bertanggung jawab, dan manusia adalah individu yang berintegritas. Pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan yaitu pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika tujuan ini tercapai oleh pemerintah, maka masyarakat sebagai pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah (Herawati et al., 2016).

Dalam *Stewardship Theory*, selaku *steward* dalam hal ini adalah pemerintah dengan fungsi pengelola sumber daya dan yang menjadi *principal* adalah rakyat selaku pemilik sumber daya (Herawati et al., 2016). Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini adalah SKPD dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai *steward*/pelayan) bagi kepentingan *principal*

(masyarakat) serta dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal (Jatmiko, 2020).

2.1.2 Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan antar manajer pemda (kepala daerah) dan rakyat selaku pemilik sumber daya dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan, dimana rakyat adalah prinsipal dan kepala daerah adalah agen. Hubungan keagenan ini dapat menimbulkan masalah keagenan sehingga prinsipal mempunyai intensif untuk memonitor perilaku agen. Prinsipal dapat menggunakan informasi akuntansi untuk memonitor kinerja agen (Zenita et al., 2021).

Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka. Usaha maksimalisasi utilitas ini mendorong timbulnya konflik kepentingan di antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), karena setiap pihak berusaha memaksimalkan kepentingannya. Pemilik menginginkan tercapainya tingkat profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan manajemen berusaha memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui kontrak kompensasi (Mardiyah, 2002).

Implikasi teori *agency* terhadap penelitian ini adalah masyarakat memberikan wewenang kepada SKPD. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, SKPD memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal, karena prinsipal tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen dan dapat menimbulkan masalah keagenan (terjadi asimetri informasi) maka prinsipal dapat menggunakan informasi laporan pertanggungjawaban untuk memonitor kinerja SKPD (Santoso & Pambelum, 2008).

2.1.3 Kinerja

Binawati & Badriyah (2022) mendefinisikan kinerja sebagai berikut, gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Sedangkan menurut Moehariono (2019:95) pengertian kinerja adalah sebuah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan.

Kinerja pemerintah adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang akan atau telah dicapai secara kuantitas dan kualitas yang terukur dalam kaitannya dengan pengeluaran anggaran (Azlina, 2019). Kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran sejauh mana pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan

mencapai tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi yang dituangkan dalam *strategic planning* suatu organisasi (Edowai et al., 2021).

Pengukuran kinerja adalah proses mengevaluasi kemajuan pekerjaan menuju tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Azlina, 2019). Kinerja instansi pemerintah dapat diukur berbasis *value for money*. Adapun elemen pengukuran kinerja pemerintah daerah berbasis *value for money* menurut Mardiasmo (2004) yaitu, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

1. Ekonomis

Ekonomis merupakan tindakan dalam menggunakan sesuatu hal secara hati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang baik. Ekonomis menggambarkan kehematan dalam pembelian barang dan jasa masukan.

2. Efisiensi

Efisiensi berarti bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan.

3. Efektivitas

Efektivitas berarti pencapaian tujuan sehingga tidak dapat dilepaskan dari keterkaitan antara pencapaian tujuan dengan *output* yang dihasilkan. Efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan program.

2.1.4 Kompetensi

Kompetensi merupakan karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual dengan kriteria referensi efektivitas dan/atau keunggulan dalam pekerjaan atau situasi tertentu (Nirwana & Haliah, 2018). Kompetensi merupakan karakteristik yang memungkinkan seseorang mencapai tingkat kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya (Kuasa et al., 2016).

Kompetensi mengacu pada karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh individu, yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan kualitas profesional pekerjaan mereka (Mulia & Saputra, 2021). Terdapat lima indikator kompetensi menurut Herachwati & S (2012):

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seorang karyawan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang tertentu. Pengetahuan pegawai juga menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya; karyawan yang memiliki pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi organisasi.

2. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan adalah upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh organisasi kepada seorang pegawai secara optimal. Selain pengetahuan dan keterampilan karyawan, elemen terpenting yang harus diperhatikan adalah perilaku pegawai.

3. Konsep Diri (*self concept*)

Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri seseorang.

4. Sifat (*traits*)

Sifat adalah karakteristik fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap situasi atau informasi.

5. Motif (*motives*)

Motif adalah sesuatu yang membuat seseorang ingin melakukan sesuatu, dan itu bisa menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindakan. Motif dapat menjadi pendorong seseorang, mengarahkan mereka ke tujuan tertentu, dan membantu mereka memilih cara terbaik untuk mencapainya.

2.1.5 Regulasi

Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *regulation* atau peraturan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “peraturan” mengacu pada aturan yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang digunakan untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dilakukan dan dipatuhi. Regulasi adalah ketentuan yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat dan atau sebuah negara (Nirwana & Haliah, 2018).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Peraturan Perundang- undangan adalah peraturan tertulis yang

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Kuasa et al., 2016).

Berdasarkan UU No. 33/2004, ps. 72 dan PP 58, ps. 36 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang kemudian disebut RKA SKPD. Realisasi APBD, RKA SKPD merupakan basis bagi manajer (pimpinan aparatur) SKPD dalam menjalankan tanggung jawab kinerjanya. Kinerja SKPD menentukan kinerja pada tiap aspek manajemen pembangunan daerah, yang pada gilirannya, menentukan kinerja daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah (Idris & Konadi, 2012). Terdapat empat indikator regulasi menurut Idris & Konadi (2012):

1. Proses penyusunan regulasi, dengan aspek sosialisasi dan pemahaman.
2. Penerapan regulasi, dengan aspek kemudahan pelaksanaan.
3. Keterkaitan antar regulasi, dengan aspek ketersediaan dukungan peraturan daerah terhadap regulasi pusat.
4. Evaluasi regulasi, dengan aspek proses evaluasi.

2.1.6 Faktor Politik

Faktor politik merupakan kekuatan untuk mengatur sebuah regulasi, faktor politik memegang peranan penting dalam jabatan-jabatan penting di

struktur pemerintahan yang nantinya dapat mempermudah atau bahkan mempersulit transparansi pelaporan keuangan daerah (Nirwana & Haliah, 2018).

Politik organisasional memungkinkan untuk menghasilkan *work outcomes* yang positif maupun yang negatif. Hasil kerja yang positif dapat mencakup hal-hal seperti peningkatan karier, ketenaran dan status, peningkatan kekuasaan dan posisi, serta penyelesaian tujuan pribadi. Namun, bisa juga terdapat hasil kerja yang negatif, seperti kehilangan kekuatan strategis dan kredibilitas posisi, perasaan negatif terhadap orang lain, perasaan bersalah, dan kinerja yang buruk (Nugroho & Sumiyanti, 2017). Terdapat empat indikator faktor politik organisasi menurut Fardian (2014):

1. Ketergantungan pada pusat

Tingkat ketergantungan daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat, maka akan semakin baik akuntabilitas yang akan diupayakan oleh Pemda tersebut. Pemerintah daerah telah diberi kebijakan otonomi daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Kebijakan mengenai otonomi daerah ini telah tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU ini, pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang berada di daerahnya masing-masing.

2. Ketaatan menjalankan peraturan perundang-undangan

Ketaatan pada peraturan-perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat. Pemerintah daerah beserta unit kerja harus menaati dan menjalankan peraturan perundangan yang berlaku. Ketaatan pada peraturan perundangan akan mendorong kelancaran program kerja sesuai sasaran dan tujuan yang akan mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Tekanan dari pimpinan jabatan politik

Tekanan merupakan hasil dari interaksi antara tugas pekerjaan dengan individu-individu lain yang melaksanakan pekerjaan itu. Tekanan-tekanan yang diberikan kepada seorang bawahan terkait dengan laporan yang dihasilkan harus disampaikan tepat waktu, akurat, dan akuntabel hal ini berkaitan dengan tuntutan dari *stakeholder*.

4. Pemberitaan akan transparansi

Faktor politik berperan dalam menekan organisasi untuk menerapkan transparansi dalam pelaporan keuangan dengan cara memberikan tekanan kepada pejabat organisasi.

2.1.7 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*)

yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018).

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang maupun badan hukum atau pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban (Santoso & Pambelum, 2008).

Menurut Santoso & Pambelum (2008), pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dan pimpinan serta semua personel lembaga pemerintah, harus mengelola pelaksanaan misi agar dapat dipertanggungjawabkan.
2. Harus ada sistem yang memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Harus mampu menunjukkan sejauh mana tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah tercapai.
4. Harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang dicapai.
5. Harus adil, obyektif dan transparan, serta berperan sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah berupa pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Terdapat lima indikator akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018):

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*).

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan.

5. Akuntabilitas financial/keuangan

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

Akuntabilitas Finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat.

2.1.8 Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang di lakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Yudhasena & Putri, 2019).

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai tentang pencapaian tujuan manajemen dalam kategori berikut : 1) efektivitas dan efisiensi operasi, 2) keandalan dari laporan keuangan, 3) ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku (Fiqri & Sari, 2018).

Sistem pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode dan tindakan yang dikoordinasikan untuk melindungi aset organisasi, mengecek keakuratan dan keandalan catatan akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajemen (Mokoginta et al., 2017). Terdapat lima indikator sistem pengendalian internal menurut Yudhasena & Putri (2019):

1. Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian mencakup sikap manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian internal organisasi. Pengertian lingkungan pengendalian adalah pembentukan suasana organisasi dan kesadaran akan perlunya pengendalian bagi suatu organisasi.

2. Penilaian resiko

Penilaian risiko pada pelaporan keuangan adalah tindakan yang diambil oleh manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko secara relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan GAAP.

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk menangani risiko, serta penerapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan manajemen risiko diterapkan secara efektif.

4. Informasi dan komunikasi

Informasi diperlukan bagi semua tingkatan manajemen dalam suatu organisasi untuk membuat keputusan dan menentukan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Informasi berkualitas diidentifikasi, diambil atau diterima, diproses serta dilaporkan melalui sistem informasi. Komunikasi terintegrasi ke dalam sistem informasi. Komunikasi juga terjadi dalam bentuk tindakan manajemen. Komunikasi tersebut harus dapat menyampaikan pesan dari manajemen bahwa karyawan perlu melakukan pengendalian internal secara serius.

5. Pemantauan

Aktivitas pengawasan atau pemantauan berhubungan dengan penilaian kualitas pengendalian internal yang berkelanjutan oleh manajemen untuk menentukan apakah pengendalian berjalan seperti yang diharapkan dan apakah pengendalian tersebut disesuaikan dengan perkembangan kondisi dalam organisasi.

2.1.9 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam satu kurun waktu tertentu. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan tentang kondisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor selama periode pelaporan (Kuasa et al., 2016).

Kualitas laporan keuangan merupakan informasi yang mencerminkan kesesuaian informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas dengan standar akuntansi yang berlaku untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Nirwana & Haliah, 2018).

Tujuan umum penyajian laporan keuangan pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pengguna. Pemerintah harus mempertimbangkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan (Kuasa et al., 2016).

Terdapat empat indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menurut Mahmudi (2011):

1. Relevan

Sebuah laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang dikandungnya mampu mempengaruhi pengguna keputusan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa sekarang, memprediksi masa depan, dan mengkonfirmasi atau memperbaiki hasil penilaian di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki nilai umpan balik, memiliki nilai prediktif, tepat waktu dan lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari istilah-istilah yang menyesatkan dan kesalahan material, memberikan pandangan yang benar dan wajar atas semua hal dan dapat diverifikasi. Informasi itu relevan, tetapi jika representasinya tidak dapat diandalkan, pengguna informasi tersebut dapat disesatkan. Informasi dianggap andal jika memenuhi kriteria berikut: penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netral.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan lebih bermanfaat bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan bisa dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Perbandingan internal

dapat dilakukan ketika suatu perusahaan menerapkan prinsip akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan jika perusahaan yang dibandingkan menggunakan prinsip akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan ke dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batasan pemahaman pengguna. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pengguna memiliki informasi yang cukup tentang aktivitas dan lingkungan operasi entitas pelapor dan bersedia untuk menelaah informasi tersebut.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini akan menghasilkan penelitian yang relevan jika didukung dengan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel penelitian. Adapun ringkasan hasil penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Binawati & Badriyah (2022) menggunakan variabel dependen kinerja dan menggunakan variabel independen pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh 31 SKPD Kabupaten Magelang yang terdiri dari Kepala Instansi, Pejabat pengelola keuangan, dan Sekretaris dari setiap SKPD. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan Secara parsial Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh

signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Secara parsial Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Secara simultan Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Penelitian Edowai et al. (2021) menggunakan variabel dependen kinerja pemerintah daerah dan independen Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh Pegawai yang ada pada 3 SKPD Kabupaten Deiyai yaitu Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan Akuntabilitas dan Transparansi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai.
3. Penelitian Mulia & Saputra (2021) menggunakan variabel dependen kinerja dan variabel independen Kompetensi, Lingkungan kerja, dan Motivasi berprestasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi Seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan Kompetensi, Lingkungan Kerja, dan Motivasi Berprestasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Kota

Padang. Kompetensi, Lingkungan kerja dan Motivasi Berprestasi secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Padang.

4. Penelitian Jatmiko (2020) menggunakan variabel dependen kinerja dan independen Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh Pejabat atau pegawai pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di dinas Kabupaten Sleman Provinsi DIY. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
5. Penelitian Fitdina Aprianto et al. (2020) menggunakan variabel dependen kinerja dan independen Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dan Sistem Pengendalian Internal. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh Pegawai yang berada di Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Kepegawaian secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Sistem Informasi Kepegawaian

dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja Aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

6. Penelitian Utama (2020) menggunakan variabel dependen kinerja dan independen Kompetensi Pegawai dan Sistem Pengendalian Internal. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh Instansi yang terdapat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang terdiri dari berbagai segi unit kerja berupa perencanaan, pelayanan umum, sekretariat, dan pengawasan. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Pegawai berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kinerja instansi Pemerintah.
7. Penelitian Hermawan (2019) menggunakan variabel dependen kinerja dan independen Kompetensi, Pendelegasian Wewenang, dan Kepuasan Kerja. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh Aparatur Sipil Negara di Bagian Pengelola Keuangan pemerintah Kabupaten Deli. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara parsial variabel kompetensi, variabel pendelegasian wewenang, dan variabel kepuasan kerja mempengaruhi kinerja Aparatur Sipil Negara pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
8. Penelitian Novatiani et al. (2019) menggunakan variabel dependen kinerja dan independen transparansi dan akuntabilitas. Metode penelitian ini

menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dari 27 SKPD di Kabupaten Bandung. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat.

9. Penelitian Yudhasena & Putri (2019) menggunakan variabel dependen kinerja dan independen *Good Government Governance*, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh Pegawai bagian keuangan di OPD Kabupaten Karangasem yang tergolong aktif.. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Government Governance*, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
10. Penelitian Fiqri & Sari (2018) menggunakan variabel dependen kinerja dan independen Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh 15 Kecamatan di Kabupaten Bogor. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

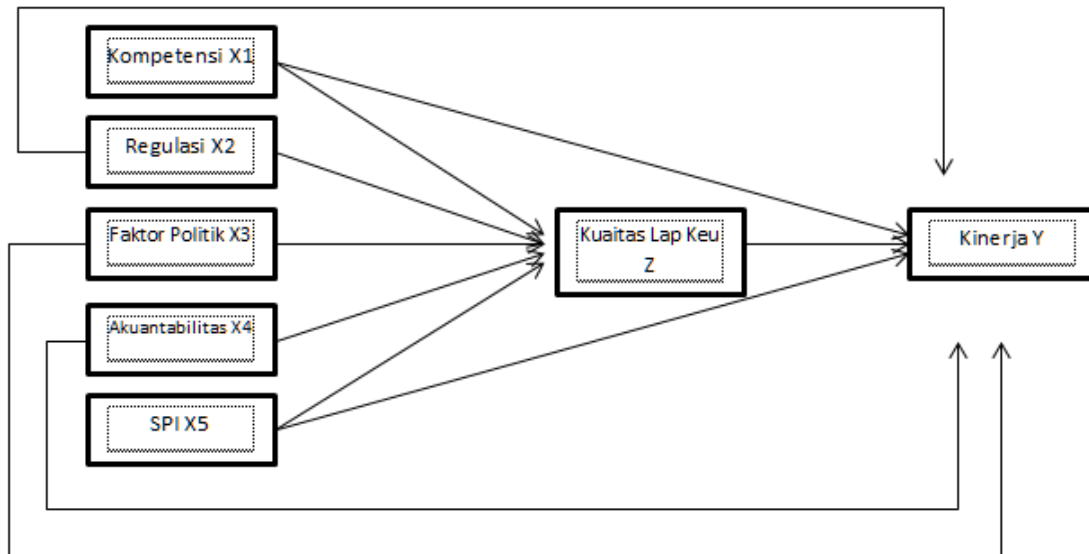
11. Penelitian Damayanti & Hermanto (2018) menggunakan variabel dependen kinerja dan independen Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian Internal. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh Seluruh pegawai SKPD Kota Surabaya. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel akuntabilitas, transparansi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada SKPD Kota Surabaya.
12. Penelitian Nirwana & Haliah, (2018) menggunakan variabel dependen *Perfomance*, variabel *Competence, Regulation, dan Political Factor*, dan variabel mediasi *Quality of Financial Statements*. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisis data menggunakan *Partial Least Square (PLS)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi, regulasi, dan faktor politik tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja. Terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan antara kompetensi, regulasi, dan faktor politik terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan.
13. Penelitian Idris & Konadi (2012) menggunakan variabel dependen Pelayanan Aparatur pada Publik, variabel independen Regulasi, dan Ketersediaan Anggaran, dan variabel mediasi kinerja aparatur. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan populasi Seluruh pegawai dari

SKPD yang banyak melakukan fungsi pelayanan pada masyarakat, yakni: 1). Dinas Pendidikan, 2). Dinas Kesehatan. 3) Dinas Pendapatan, 4). Kependudukan, 5). Dinas Perijinan dan Bangunan. Teknik analisis data menggunakan *Partial Least Square (PLS)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Semakin implementatifnya ketersediaan anggaran dan regulasi dalam pelayanan publik, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja pelayanan aparatur.

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada kajian teori serta penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, dapat dibentuk kerangka berfikir dari penelitian ini. Penelitian ini dimaksudkan guna menguji pengaruh kompetensi, regulasi, faktor politik, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Wonogiri. Kerangka berfikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut *stewardship theory*, aparatur sebagai *steward* memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat (*principal*) dengan baik dan kompeten untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya dimiliki oleh aparatur (Aprilya & Fitria, 2020).

Menurut Utama (2020), kompetensi diidentifikasi dengan mereka yang berkinerja lebih baik, lebih konsisten dan efektif daripada mereka yang rata-rata atau bahkan sama sekali tidak kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Kompetensi merupakan salah satu penentu tinggi rendahnya kinerja seseorang.

Semakin tinggi pegawai yang kompeten, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan pegawai yang berkompeten akan menghasilkan kinerja yang berkualitas (Utama, 2020). Sejalan dengan penelitian Hermawan (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi, pendelegasian wewenang, dan kepuasan kerja mempengaruhi kinerja aparatur sipil negara pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta penelitian Utama (2020) yang menyatakan bahwa pengendalian internal pemerintah dan kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H_1 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.4.2 Pengaruh Regulasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori *stewardship*, kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah), *steward* bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Studi ini menjelaskan keberadaan pemerintah daerah (*steward*) sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kebaikan masyarakat (*principal*) (Rizal & Hermanto, 2019).

Dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada publik telah diterbitkan UU. No. 25/ 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur dan membangun kepercayaan masyarakat atas layanan publik yang dilakukan oleh

penyelenggara pelayanan publik, agar penyediaan layanan publik menjadi berkualitas serta memberi perlindungan kepada pengguna layanan, sesuai dengan norma dan asas hukum secara jelas (Idris & Konadi, 2012).

Semakin tinggi penerapan regulasi yang memadai, maka kinerja pemerintah yang dihasilkan akan semakin baik. Hal ini dikarenakan jika peraturan diterapkan dengan benar, maka informasi yang disampaikan kepada masyarakat/publik akan terlaksanakan dengan benar (Kuasa et al., 2016).

Sejalan dengan penelitian Idris & Konadi (2012) yang menyatakan bahwa semakin implementatifnya regulasi dalam pelayanan publik, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja pelayanan aparatur.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H_2 : Regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.4.3 Pengaruh Faktor Politik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut teori keagenan (*agency theory*), hubungan antara politisi dan masyarakat dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan, dimana masyarakat adalah prinsipal dan politisi adalah agen. Hubungan keagenan ini dapat menimbulkan masalah keagenan sehingga prinsipal mempunyai intensif untuk memantau perilaku agen. Rakyat mengharuskan pemerintah agar memberikan pertanggungjawabannya terhadap pengelolaan sumber daya yang rakyat

percaya kepada pemerintah dengan mekanisme pelaporan keuangan secara periodik dan transparansi (Zenita et al., 2021).

Menurut Nirwana & Haliah (2018), Faktor politik sangat besar pengaruhnya karena ciri khas sektor publik di Indonesia khususnya pada pemerintahan sangat dipengaruhi oleh keadaan politik. Faktor politik dapat berupa intervensi politik di bidang keuangan dan ketidaksinergian antara lembaga politik dan proses politik terhadap bidang administrasi pemerintahan. Strategi diseminasi juga ikut berperan, jika suatu kelompok organisasi ingin memenuhi komitmennya, tentunya mereka akan menggunakan segala cara untuk menyebarkan informasinya kepada masyarakat (Baber & Sen, 1984).

Merujuk pada penelitian Baber (1983) yang melakukan explanatory research untuk mengetahui pengaruh proses politik dalam keputusan untuk melaporkan informasi keuangan dalam laporan keuangan, penelitian tersebut mengasumsikan bahwa Setelah terpilih, politisi dapat mengabaikan perjanjian pra-pemilu tanpa takut akan pelengseran. Namun, perilaku oportunistik ini dapat berkurang jika ada oposisi yang kuat yang menguasai kelompok di pemerintahan. Dalam hal ini, rival politik akan meminta untuk menginformasikan pendapat publik tentang penyimpangan tindakan pemerintah sehubungan dengan janji pemilu yang dibuat. Oleh karena itu, oposisi ini berfungsi untuk membendung penyimpangan kepentingan antara pemilih dan politisi. Akibatnya, politisi mungkin berkepentingan untuk menepati janji yang dibuat kepada pemilih jika mereka ingin terpilih kembali. Tentunya semakin tinggi faktor ini maka semakin

tinggi tingkat persaingan politik dan semakin baik pula hasil kinerja yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H_3 : Faktor politik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.4.4 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut *Stewardship Theory*, selaku *steward* dalam hal ini adalah pemerintah dengan fungsi pengelola sumber daya dan yang menjadi *principal* adalah rakyat selaku pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi (Jatmiko, 2020). Dalam penelitian ini akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) dengan mengungkap segala informasi, baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut.

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan konsep terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dari satu pihak ke pihak yang lain (Jatmiko, 2020). Menurut Edowai et al. (2021), era reformasi membawa dampak terhadap tuntutan adanya akuntabilitas (*accountability*) untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik.

Akuntabilitas publik merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. Hal ini karena akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kerjanya (Edowai et al., 2021).

Sejalan dengan penelitian Jatmiko (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Edowai et al. (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. Penelitian Novatiani et al. (2019) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian Binawati & Badriyah (2022) menyatakan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H_4 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.4.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam teori *stewardship*, dijelaskan bahwa sifat individu dapat berperilaku jujur kepada pihak-pihak lainnya, dapat dipercaya, serta memiliki integritas (Ikriyati & Aprila, 2019). Sistem pengendalian internal pemerintah dimana pemerintah bertanggung jawab memonitor aktivitas yang dilakukan dan akan menghasilkan kinerja yang berkualitas untuk kepuasan prinsipal, oleh karena itu pemerintah melakukan sistem pengendalian internal dengan cara mengontrol semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan.

Menurut Yudhasena & Putri (2019), fungsi pengendalian intern yaitu membantu sumber daya manusia untuk mengetahui batasan-batasan dan hak-hak dalam bekerja serta teknologi informasi seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaannya tersebut.

Pengendalian intern mempermudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa kita ketahui secara jelas. Semakin baik pengendalian intern yang diterapkan, maka pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta kinerja yang baik (Mokoginta et al., 2017).

Sejalan dengan penelitian Yudhasena & Putri (2019) yang menyatakan bahwa *good government governance*, pengendalian internal, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Karangasem. Penelitian Fitdina Aprianto et al. (2020) menyatakan bahwa sistem informasi kepegawaian dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Penelitian Utama (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H_5 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.4.6 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori *stewardship*, aparat dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga pelayanan publik kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *steward* (pembuat laporan keuangan) memiliki kompetensi untuk mengarahkan semua kemampuan dengan mengefektifkan pengendalian internal dan teknologi informasi (Fauziyah, 2019). Dalam penelitian ini sumberdaya yang berkompeten akan dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan akan menghasilkan kinerja yang baik.

Menurut Herawati et al. (2016), dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan serta pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada.

Jika sumber daya manusia memiliki kompetensi yang baik maka laporan keuangan akan mengalami minim kekeliruan. Sebaliknya, kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Alminanda & Marfuah, 2018).

Dengan adanya pegawai yang kompeten, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan akan berpengaruh terhadap tingginya kinerja. Sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan mampu memediasi antara kompetensi, regulasi, dan faktor politik terhadap kinerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis keenam yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H_6 : Kualitas laporan keuangan mampu memediasi hubungan antara kompetensi terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.4.7 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Regulasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori *stewardship*, kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah), *steward* bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi (Rizal & Hermanto, 2019). Dalam penelitian ini menjelaskan jika pemerintah daerah (*steward*) menaati regulasi yang ditetapkan maka akan menciptakan pertanggungjawaban keuangan publik, hal ini akan meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas dan menghasilkan kinerja yang baik.

Menurut Kuasa et al. (2016), regulasi publik harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya.

Pemerintah daerah, Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyusun peraturan tentang system akuntansi pemerintahan mengacu kepada peraturan pemerintah dan ketentuan perundang- undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah (PP No. 71/2010 pasal 6 ayat 3).

Semakin tinggi penerapan regulasi yang memadai, maka kinerja pemerintah yang dihasilkan melalui kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Hal ini dikarenakan semakin lengkapnya/tersedianya pelaksana sistem dan prosedur regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah disetiap SKPD maka akan

menjadi lebih mudah menyusun dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akan berpengaruh terhadap tingginya kinerja (Kuasa et al., 2016).

Sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan mampu memediasi antara kompetensi, regulasi, dan faktor politik terhadap kinerja. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ketujuh yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H_7 : Kualitas laporan keuangan mampu memediasi hubungan antara regulasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.4.8 Pengaruh peran Kualitas Laporan keuangan dalam memediasi hubungan antara Faktor Politik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), hubungan antar politisi dan pemilih (*voter*) dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan, dimana voter adalah prinsipal dan politisi adalah agen (Zenita et al., 2021). Hubungan keagenan ini dapat menimbulkan masalah keagenan yaitu asimetri informasi. Pelaporan keuangan melalui berbagai media yang dilakukan oleh politisi (*agent*) merupakan sebuah upaya untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Hal ini bertujuan agar terciptanya transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah untuk mengurangi asimetri informasi serta untuk mengawasi perilaku politisi (*agent*) dan menyelaraskan tujuan antara prinsipal dengan agen sehingga menciptakan kinerja yang baik.

Pembentukan standar sebagai proses politik mempengaruhi pemerintah, sektor publik, dan sektor privat (Mardiyah, 2002). Menurut Davici (2018), upaya organisasi dalam mencari legitimasi tidak bebas dari pengaruh faktor politik yang menguasai lingkungan dimana organisasi berada. Faktor politik merupakan kekuatan dalam mengatur dan membuat sebuah regulasi dan aturan di dalam pemerintahan.

Faktor politik berperan dalam menekankan organisasi dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan dengan cara memberikan tekanan kepada pejabat terkait organisasi tersebut dan menerapkan sebuah kebijakan yang berguna dalam upaya penerapan transparansi keuangan (Zenita et al., 2021). Dengan demikian penerapan transparansi dalam hal laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas kinerja melalui laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan mampu memediasi antara kompetensi, regulasi, dan faktor politik terhadap kinerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedelapan yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H_8 : Kualitas laporan keuangan mampu memediasi hubungan antara faktor politik terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.4.9 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hubungan teori stewardship terhadap penelitian ini adalah dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah (steward) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (principal). Pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akan meningkatkan kinerja instansi (Jatmiko, 2020).

Akuntabilitas yang terdefinisi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kejelasan transaksi data melalui pembuktian tertulis atas pencatatan yang dilakukan secara actual agar terhindar dari hal-hal yang bersifat curang (Sastra et al, 2015).

Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas suatu perangkat daerah, maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik melalui kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan implementasi prinsip akuntabilitas akan mendorong nilai kualitas laporan keuangan menjadi meningkat dan berpengaruh terhadap tingginya kinerja pemerintah daerah (Edowai et al., 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedelapan yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H_9 : Kualitas laporan keuangan mampu memediasi hubungan antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.4.10 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern dikaitkan dengan teori stewardship menggambarkan struktur yang memfasilitasi dan memberdayakan pengendalian intern menjadi efektif guna menghasilkan tingkat kemandirian keuangan yang baik. Sistem pengendalian intern yang efektif akan menjamin pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran (Dewi, 2017)

Sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi-operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan (Ikriyati & Aprilia, 2019).

Menurut Mahmudi (2011), untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang

diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah. Semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, maka pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akan mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedelapan yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H_{10} : Kualitas laporan keuangan mampu memediasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini yaitu dari penyusunan usulan penelitian sampai dengan terlaksananya laporan penelitian. Wilayah yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Wonogiri.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Soegiyono, 2013). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, regulasi, faktor politik, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah melalui kualitas laporan keuangan di Kabupaten Wonogiri.

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Soegiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Soegiyono, 2013). Proses pengambilan sebagian dari populasi dan pengamatan secara keseluruhan pada populasi disebut pengambilan sampel. Sampel pada penelitian ini berjumlah 26 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Wonogiri.

Tabel 3. 1

Responden yang Digunakan Sebagai Sampel

No	Nama Instansi	Pimpinan Dinas atau Badan	Sekretaris	Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang	Kepala Bagian/ Kepala Bidang	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri	1	-	1	-	2
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri	1	-	1	1	3
3.	Inspektorat Kabupaten	1	1	1	-	3

	Wonogiri					
4.	RSUD dr. Soedirman Mangun Sumarso Wonogiri	1	-	-	2	3
5.	Badan Kepegawaian Daerah	1	1	1	-	3
6.	BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Wonogiri	1	1	2	-	3
7.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri	1	1	14	6	22
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri	1	1	2	-	4
9.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
10.	Dinas Kesehatan Kabupaten	1	1	1	-	3

	Wonogiri					
11.	Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
12.	Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
13.	Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
14.	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
15.	DPMPTSP Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
16.	Dinas KUKM dan Perindag Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
17.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
18.	Dinas Komunikasi	1	1	1	-	3

	dan Informatika Kabupaten Wonogiri					
19.	DISPERA dan KPP Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
20.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
21.	Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
22.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
23.	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
24.	DISLAPERNAK Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
25.	Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3

26.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri	1	1	1	-	3
Total						97

Sumber: www.wonogirikab.go.id

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan kriteria tertentu (Soegiyono, 2013). Kriteria tersebut terdiri dari:

1. Pimpinan Dinas atau Badan
2. Sekretaris
3. Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang berhubungan dengan keuangan dan perencanaan
4. Kepala Subbagian atau Kepala Subbidang yang berhubungan dengan keuangan dan perencanaan

3.4 Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Soegiyono, 2013). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner dengan memberikan daftar pertanyaan untuk selanjutnya diisi oleh responden yang telah ditentukan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode survey melalui penyebaran kuesioner yang berisi daftar pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien jika peneliti memahami pengukuran variabel serta apa yang dapat diharapkan dari responden (Soegiyono, 2013).

3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Soegiyono, 2013). Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini diantaranya:

1. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Soegiyono, 2013). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah (Y).

2. Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)

(Soegiyono, 2013). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi (*X1*), regulasi (*X2*), faktor politik (*X3*), akuntabilitas (*X4*), dan sistem pengendalian internal (*X5*).

3. Variabel Mediasi

Variabel mediasi adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur (Soegiyono, 2013).

Variabel mediasi dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan (*Z*).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasional variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat. Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dalam penelitiannya ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2

Definisi Operasional Variabel

No	Nama Variabel	Definisi	Indikator
1.	Kinerja	Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang	1. Ekonomis 2. Efektif 3. Efisiensi (Mardiasmo, 2004)

		dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara sah tanpa melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Mardiasmo, 2004).	
2.	Kompetensi	Kompetensi merupakan karakteristik dasar yang memiliki hubungan kasual dengan kriteria referensi efektivitas dan/atau keunggulan dalam pekerjaan atau situasi tertentu (Herachwati & S, 2012).	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Knowledge</i> 2. <i>Skill</i> 3. <i>Self Concept</i> 4. <i>Traits</i> 5. <i>Motives</i> (Herachwati & S, 2012)
3.	Regulasi	Regulasi adalah ketentuan yang digunakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam sebuah masyarakat dan atau sebuah negara (Kurniawan W, 2008).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyusunan regulasi 2. Penerapan regulasi 3. Keterkaitan antar regulasi 4. Evaluasi regulasi (Idris & Konadi, 2012)
4.	Faktor Politik	Faktor politik adalah kekuatan dalam mengatur dan membuat sebuah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketergantungan pada pusat 2. Ketaatan menjalankan

		<p>regulasi, yang dimana dalam hal ini faktor politik memegang peranan penting dalam jabatan-jabatan penting di dalam struktur pemerintahan yang nantinya dapat memudahkan ataupun menyulitkan transparansi pelaporan laporan keuangan daerah (DiMaggio & Powell, 1983).</p>	<p>peraturan perundang-undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Tekanan dari pimpinan jabatan politik 4. Pemberitaan akan transparansi (Fardian, 2014)
5.	Akuntabilitas	<p>Akuntabilitas merupakan pihak pemegang amanah (<i>agent</i>) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (<i>principal</i>) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran 2. Akuntabilitas manajerial 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas kebijakan 5. Akuntabilitas financial/keuangan (Mardiasmo, 2018)
6.	Sistem Pengendalian Internal	<p>Sistem pengendalian intern yaitu proses</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian

		yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Yudhasena & Putri, 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penilaian resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan (Yudhasena & Putri, 2019)
7.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitas laporan keuangan merupakan informasi untuk membantu <i>stakeholders</i> dalam membuat keputusan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2011).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (Mahmudi, 2011)

3.8 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis kembali agar memperoleh kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu, peneliti perlu menetapkan teknik analisis

yang sesuai dengan tujuan, serta digunakan untuk menguji kebenaran dari hipotesis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) teknik ini merupakan sebuah perluasan model dari analisis regresi linier berganda dengan menerapkan mediasi. Kemudian dituangkan dalam *software* berupa *Smart PLS 4*.

Partial Least Square (PLS) adalah model persamaan *Structural Equation Modelling (SEM)* berbasis komponen atau varian. Prakiraan dalam PLS, variabel independen, merupakan agregasi linier dari setiap indikator. Estimasi bobot digunakan untuk membuat komponen skor variabel yang diperoleh dari model internal tertentu (model struktural keterkaitan antar variabel) dan model eksternal (model pengukuran, yaitu hubungan antara indikator dan konstruksinya). Hasilnya adalah residual dari variabel dependen (Imam Ghazali, 2008).

Analisis pada *Partial Least Square (PLS)*, dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Analisis *Outer Model*

Analisa *Outer Model* digunakan untuk menguji pengukuran yang layak digunakan untuk dijadikan pengukuran yang valid.

a. *Convergent Validity*

Convergent Validity (validitas konvergen) model pengukuran dan model refleksi indeks dinilai berdasarkan korelasi antara skor item atau skor komponen dan skor konstruk yang dihitung dengan PLS. Pengukuran refleksi

dikatakan tinggi jika korelasinya dengan struktur yang diukur lebih besar dari 0,70. Untuk studi pada tahap awal pengembangan skala pengukuran, nilai *loading* 0,5 sampai 0,60 dianggap cukup. (Imam Ghozali, 2008).

b. Discriminant Validity

Discriminant Validity dari model pengukuran dengan metrik refleksi dievaluasi berdasarkan *cross loading* dari pengukuran yang dibangun. Jika korelasi antara satu konstruk dan satu ukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, hal ini menunjukkan bahwa konstruk variabel merupakan prediktor ukuran blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya. Nilai pengiriman lebih besar dari 0,70. Validitas diskriminan menunjukkan tingkat yang ditunjukkan oleh temuan penelitian empiris (Imam Ghozali, 2008).

c. Composite Reliability

Composite Reliability Keandalan keseluruhan struktur pengukuran dapat dinilai dengan dua cara, yaitu konsistensi internal dan alfa Cronbach (Imam Ghozali, 2008). Pada uji *Cronbach's Alpha* nilai yang diharapkan lebih dari 0,70 untuk semua konstruk.

d. Average Variance Extracted (AVE)

Average Variance Extracted (AVE) ukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas skor komponen variabel, hasilnya lebih konservatif daripada reliabilitas komposit, nilai AVE harus lebih besar dari 0,5 (Imam Ghozali, 2008).

2. Analisis *Inner Model*

Inner Model menggambarkan hubungan antara variabel berdasarkan pada teori substantif. Model structural dievaluasi menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen.

a. *Coefficient of determination* (R²)

Coefficient of determination (R²) Saat mengevaluasi model menggunakan PLS, pertama-tama ia melihat *R square* untuk setiap variabel dependen. Interpretasinya sama dengan regresi. Perubahan nilai *R squared* dapat digunakan untuk menilai apakah pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel dependen adalah material. Nilai-nilai *R square* adalah 0,75 (kuat), 0,05 (sedang), dan 0,25 (lemah). (Imam Ghozali, 2008).

4. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dapat mengetahui apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak dengan melihat t statistik dan nilai p value. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan uji dua sisi yang menggambarkan kekuatan antar struktur (uji koefisien jalur langsung dan uji koefisien jalur efek tidak langsung). Untuk menilai koefisien jalur yang signifikan, seseorang dapat diperoleh dari bootstrap (metode resampling). Nilai P value kurang dari 0,05 (Rialdy et al., 2021).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Proses Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 97 orang dengan kriteria tertentu. Sampel diperoleh dengan menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh sebanyak 97 orang. Penelitian ini terdiri dari 3 jenis variabel yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel mediasi.

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja pemerintah daerah. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompetensi, regulasi, faktor politik, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal. Variabel mediasi dalam penelitian ini yaitu kualitas laporan keuangan. Pada bab ini akan dibahas tahap-tahap pengolahan data yang kemudian akan dianalisis dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.

4.1.2 Deskripsi Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini menjelaskan tentang profil responden pengguna uang elektronik. Karakteristik responden terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, jabatan, dan lama bekerja di OPD.

1. Jenis Kelamin Responden

Tabel 4. 1
Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Frequency	Percent
Valid	Laki-laki	60	61,9
	Perempuan	37	38,1
	Total	97	100,0

Sumber : Hasil olah data SPSS 26.0

Berdasarkan tabel di atas, jenis kelamin dari 97 responden memaparkan bahwa 60 responden (61,9%) laki-laki dan 37 responden (38,1%) perempuan. Jumlah responden laki-laki lebih tinggi dari pada jumlah responden perempuan.

2. Usia Responden

Tabel 4. 2
Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Usia		Frequency	Percent
Valid	36-45 tahun	19	19,6
	>46 tahun	78	80,4
	Total	97	100,0

Sumber : Hasil olah data SPSS 26.0

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 97 responden yang diperoleh, terdiri dari umur yang beragam. Terdapat 19 responden (19,6%) yang berusia 36-45 tahun dan 78 responden (80,4%) berusia >46 tahun.

3. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 4. 3
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pend. Terakhir

		Frequency	Percent
Valid	D3	5	5,2
	S1	24	24,7
	S2	59	60,8
	S3	9	9,3
	Total	97	100,0

Sumber : Hasil olah data SPSS 26.0

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 97 responden yang diperoleh, terdiri dari pendidikan terakhir yang beragam. Terdapat 5 responden (5,2%) yang memiliki pendidikan terakhir D3, 24 responden (24,7%) dengan pendidikan terakhir S1, 59 responden (60,8%) dengan pendidikan S2, dan 9 responden (9,3%) dengan pendidikan terakhir S3.

4. Latar Belakang Pendidikan Responden

Tabel 4. 4
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Latber Pend.

		Frequency	Percent
Valid	Akuntansi	11	11,3
	Manajemen	46	47,4
	Lainnya	40	41,2
	Total	97	100,0

Sumber : Hasil olah data SPSS 26.0

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 97 responden yang diperoleh, terdiri dari latar belakang pendidikan yang beragam. Terdapat 11 responden (11,3%) yang memiliki pendidikan terakhir D3, 24 responden (24,7%) dengan pendidikan terakhir S1, 59 responden (60,8%) dengan pendidikan S2, dan 9 responden (9,3%) dengan pendidikan terakhir S3.

5. Jabatan Responden

Tabel 4. 5
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Jabatan	
		Frequency	Percent
Valid	Pimpinan	26	26,8
	Sekretaris	23	23,7
	Kabag/Kabid	8	8,2
	Kasubag/Kasubid	40	41,2
	Total	97	100,0

Sumber : Hasil olah data SPSS 26.0

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 97 responden yang diperoleh, terdapat 26 responden (26,8%) sebagai pimpinan, 23 responden (23,7%) sebagai sekretaris, 8 responden (8,2%) sebagai kabag/kabid, dan 40 responden (41,2%) sebagai kasubag/kasubid.

6. Lama Bekerja di OPD

Tabel 4. 6
Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Lama Bekerja			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	16-25 tahun	33	34,0	34,0	34,0
	>25 tahun	64	66,0	66,0	100,0
Total		97	100,0	100,0	

Sumber : Hasil olah data SPSS 26.0

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 97 responden yang diperoleh, terdapat 33 responden (34%) yang bekerja selama selama 16-25 tahun dan terdapat 64 responden (66%) yang bekerja selama >25 tahun.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Soegiyono, 2013). Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif guna menggambarkan data responden terkait kompetensi, regulasi, faktor politik, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, dan kinerja.

Tabel 4. 7
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Kinerja	97	4.00	11.00	15.00	13.8763	1.26044	1.589
Kompetensi	97	7.00	18.00	25.00	21.7010	2.10240	4.420
Regulasi	97	10.00	15.00	25.00	20.7732	2.07417	4.302
Faktor Politik	97	6.00	14.00	20.00	17.4845	1.74471	3.044
Akuntabilitas	97	9.00	16.00	25.00	21.7113	2.16967	4.707
Sistem Pengendalian Internal	97	9.00	21.00	30.00	26.1959	2.49850	6.242
Kualitas Lap Keu	97	11.00	14.00	25.00	22.0722	2.39899	5.755
Valid N (listwise)	97						

Sumber : Hasil olah data SPSS 26.0

1. Variabel Kinerja

Variabel kinerja memiliki 3 item pertanyaan dengan 5 alternatif pilihan jawaban yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5). Jumlah item kuesioner pengukuran variabel kinerja sejumlah 3, sehingga skor tertinggi yang diharapkan adalah 15 dan skor terendah adalah 11. Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa variabel kinerja memperoleh nilai minimum 11, nilai maksimum 15, nilai mean 13.876, dan nilai standard deviation 1.260.

2. Variabel Kompetensi

Variabel kompetensi memiliki 5 item pertanyaan dengan 5 alternatif pilihan jawaban yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5). Jumlah item kuesioner pengukuran variabel kompetensi sejumlah 5, sehingga skor tertinggi yang diharapkan adalah 25 dan skor terendah adalah 18. Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa variabel kompetensi memperoleh nilai minimum 18, nilai maksimum 25, nilai mean 21.701, dan nilai standard deviation 2.102.

3. Variabel Regulasi

Variabel regulasi memiliki 5 item pertanyaan dengan 5 alternatif pilihan jawaban yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5). Jumlah item kuesioner pengukuran variabel regulasi sejumlah 5, sehingga skor tertinggi yang diharapkan adalah 25 dan skor terendah adalah 15. Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa variabel

kompetensi memperoleh nilai minimum 15, nilai maksimum 25, nilai mean 20.773, dan nilai standard deviation 2.074.

4. Variabel Faktor Politik

Variabel faktor politik memiliki 4 item pertanyaan dengan 5 alternatif pilihan jawaban yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5). Jumlah item kuesioner pengukuran variabel kompetensi sejumlah 4, sehingga skor tertinggi yang diharapkan adalah 20 dan skor terendah adalah 14. Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa variabel kompetensi memperoleh nilai minimum 14, nilai maksimum 20, nilai mean 17.484, dan nilai standard deviation 1.744.

5. Variabel Akuntabilitas

Variabel akuntabilitas memiliki 5 item pertanyaan dengan 5 alternatif pilihan jawaban yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5). Jumlah item kuesioner pengukuran variabel akuntabilitas sejumlah 5, sehingga skor tertinggi yang diharapkan adalah 25 dan skor terendah adalah 16. Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas memperoleh nilai minimum 16, nilai maksimum 25, nilai mean 21.711, dan nilai standard deviation 2.169.

6. Variabel Sistem Pengendalian Internal

Variabel sistem pengendalian internal memiliki 6 item pertanyaan dengan 5 alternatif pilihan jawaban yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5). Jumlah item kuesioner pengukuran

variabel sistem pengendalian internal sejumlah 5, sehingga skor tertinggi yang diharapkan adalah 21 dan skor terendah adalah 30. Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal memperoleh nilai minimum 21, nilai maksimum 30, nilai mean 26.195, dan nilai standard deviation 2.498.

7. Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Variabel kualitas laporan keuangan memiliki 5 item pertanyaan dengan 5 alternatif pilihan jawaban yaitu Sangat tidak setuju (1), Tidak setuju (2), Netral (3), Setuju (4), Sangat Setuju (5). Jumlah item kuesioner pengukuran variabel kualitas laporan keuangan sejumlah 5, sehingga skor tertinggi yang diharapkan adalah 14 dan skor terendah adalah 25. Tabel di atas dapat menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan memperoleh nilai minimum 14, nilai maksimum 25, nilai mean 22,072 dan nilai standard deviation 2.398.

4.2.2 Pengujian Instrumen Penelitian Outer Model

Analisa *outer model* digunakan untuk menguji pengukuran yang layak digunakan untuk dijadikan pengukuran yang valid. Uji *outer model* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Convergent Validity*

Pengujian validitas ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang diukur. Pengujian validitas ini untuk

menjamin bahwa instrument yang digunakan telah sesuai dengan konsep untuk mengukur variabel. Uji *convergent validity* dapat dikatakan valid apabila nilai *loading factor* lebih dari 0,70. Hasil uji *convergent validity* dari penelitian ini yaitu:

a. Kompetensi

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil *convergent validity* pada variabel kompetensi (X1) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8

Hasil Uji *Convergent Validity*

Variabel Indikator	Kompetensi
X1.1	0,889
X1.2	0,883
X1.3	0,868
X1.4	0,869
X1.5	0,876

Tabel di atas menunjukkan indikator pernyataan variabel kompetensi telah memenuhi *convergen validity* diatas 0,70 sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

b. Regulasi

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil *convergent validity* pada variabel regulasi (X2) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9

Hasil Uji *Convergent Validity*

Variabel Indikator	Regulasi
X2.1	0,840
X2.2	0,833

X2.3	0,881
X2.4	0,880
X2.5	0,823

Tabel di atas menunjukkan indikator pernyataan variabel regulasi telah memenuhi *convergen validity* diatas 0,70 sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

c. Faktor Politik

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil *convergent validity* pada variabel faktor politik (X3) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 10

Hasil Uji *Convergent Validity*

Variabel Indikator	Faktor Politik
X3.1	0,881
X3.2	0,886
X3.3	0,890
X3.4	0,892

Tabel di atas menunjukkan indikator pernyataan variabel faktor politik telah memenuhi *convergen validity* diatas 0,70 sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

d. Akuntabilitas

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil *convergent validity* pada variabel akuntabilitas (X4) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 11

Hasil Uji *Convergent Validity*

Variabel Indikator	Akuntabilitas
X4.1	0,912
X4.2	0,926

X4.3	0,890
X4.4	0,909
X4.5	0,880

Tabel di atas menunjukkan indikator pernyataan variabel akuntabilitas telah memenuhi *convergen validity* diatas 0,70 sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

e. Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil *convergent validity* pada variabel sistem pengendalian internal (X5) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 12

Hasil Uji *Convergent Validity*

Variabel Indikator	Sistem Pengendalian Internal
X5.1	0,853
X5.2	0,864
X5.3	0,867
X5.4	0,869
X5.5	0,825
X5.6	0,859

Tabel di atas menunjukkan indikator pernyataan variabel sistem pengendalian internal telah memenuhi *convergen validity* diatas 0,70 sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

f. Kinerja

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil *convergent validity* pada variabel kinerja (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 13

Hasil Uji *Convergent Validity*

Variabel Indikator	Kinerja
Y.1	0,867
Y.2	0,881
Y.3	0,827

Tabel di atas menunjukkan indikator pernyataan variabel kinerja telah memenuhi *convergen validity* diatas 0,70 sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

g. Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil *convergent validity* pada variabel kualitas laporan keuangan (Z) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 14

Hasil Uji *Convergent Validity*

Variabel Indikator	Kualitas Laporan Keuangan
Z.1	0,835
Z.2	0,817
Z.3	0,857
Z.4	0,825
Z.5	0,836

Tabel di atas menunjukkan indikator pernyataan variabel kualitas laporan keuangan telah memenuhi *convergen validity* diatas 0,70 sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

2. *Discriminant Validity*

Discriminant validity menunjukkan tingkatan yang ditunjukkan oleh hasil penelitian yang empiris. Uji *discriminant validity* dapat dikatakan valid apabila nilai *cross loading* lebih dari 0,70. Hasil uji *discriminant validity* dari penelitian ini yaitu:

a. Kompetensi

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil *discriminant validity* pada variabel kompetensi (X1) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 15

Hasil Uji *Discriminant Validity*

Variabel Indikator	Kompetensi
X1.1	0,889
X1.2	0,883
X1.3	0,868
X1.4	0,869
X1.5	0,876

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel kinerja telah memenuhi *discriminant validity* diatas 0,70 sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

b. Regulasi

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil *discriminant validity* pada variabel reguasi (X2) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 16

Hasil Uji *Discriminant Validity*

Variabel Indikator	Regulasi
X2.1	0,840
X2.2	0,833
X2.3	0,881
X2.4	0,880
X2.5	0,823

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel regulasi telah memenuhi *discriminant validity* diatas 0,70 sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

c. Faktor Politik

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil *discriminant validity* pada variabel faktor politik (X3) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 17

Hasil Uji *Discriminant Validity*

Variabel Indikator	Faktor Politik
X3.1	0,881
X3.2	0,886
X3.3	0,890
X3.4	0,892

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel faktor politik telah memenuhi *discriminant validity* diatas 0,70 sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

d. Akuntabilitas

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil *discriminant validity* pada variabel akuntabilitas (X4) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 18

Hasil Uji *Discriminant Validity*

Variabel Indikator	Akuntabilitas
X4.1	0,912
X4.2	0,926
X4.3	0,890
X4.4	0,909
X4.5	0,880

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel akuntabilitas telah memenuhi *discriminant validity* diatas 0,70 sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

e. Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil *discriminant validity* pada variabel sistem pengendalian internal (X5) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 19

Hasil Uji *Discriminant Validity*

Variabel Indikator	Sistem Pengendalian Internal
X5.1	0,853
X5.2	0,864
X5.3	0,867
X5.4	0,869
X5.5	0,825
X5.6	0,859

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel sistem pengendalian internal telah memenuhi *discriminant validity* diatas 0,70 sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

f. Kinerja

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil *discriminant validity* pada variabel kinerja (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 20

Hasil Uji *Discriminant Validity*

Variabel Indikator	Kinerja
Y1	0,867
Y2	0,881
Y3	0,827

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel kinerja telah memenuhi *discriminant validity* diatas 0,70 sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

g. Kualitas Laporan keuangan

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka hasil *discriminant validity* pada variabel kuitas laporan keuangan (Z) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 21

Hasil Uji *Discriminant Validity*

Variabel Indikator	Kuitas Laporan Keuangan
Z1	0,835
Z2	0,817
Z3	0,857
Z4	0,825
Z5	0,836

Tabel di atas menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan variabel kualitas laporan keuangan telah memenuhi *discriminant validity* diatas 0,70 sehingga semua item sudah memenuhi kriteria validitas yang telah ditentukan.

3. *Composite Reliability*

Composite Reability digunakan untuk mengukur reabilitas suatu instrument dalam penelitian untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. *Composite Reability* dapat dikatakan valid apabila lebih dari 0,70. Hasil uji *Composite Reability* dari penelitian ini yaitu:

Tabel 4. 22

Hasil Uji *Composite Reliability*

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
Kompetensi_	0,925	0,925	0,943
Akuntabilitas_	0,944	0,944	0,957
Faktor Politik_	0,910	0,910	0,937
Kinerja Pemerintah_	0,821	0,823	0,894

Kualitas Lap Keu	0,891	0,892	0,920
Regulasi_	0,905	0,907	0,930
Sistem Pengendalian Internal_	0,927	0,927	0,943

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Composite Reliability* pada masing-masing variabel lebih dari 0,70 sehingga semua item variabel sudah memenuhi kriteria reabilitas yang telah ditentukan.

4. *Average Variance Extraced (AVE)*

Pengukuran ini digunakan untuk mengukur reabilitas *component score* variabel. Nilai AVE dapat dikatakan valid apabila lebih dari 0,5. Hasil uji *Average Variance Extracted (AVE)* dari penelitian ini yaitu:

Tabel 4. 23

Hasil Uji *Average Variance Extraced (AVE)*

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Kompetensi_	0,925	0,925	0,943	0,769
Akuntabilitas_	0,944	0,944	0,957	0,816
Faktor Politik_	0,910	0,910	0,937	0,787
Kinerja Pemerintah_	0,821	0,823	0,894	0,737
Kualitas Lap Keu	0,891	0,892	0,920	0,696
Regulasi_	0,905	0,907	0,930	0,726
Sistem Pengendalian Internal_	0,927	0,927	0,943	0,733

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Average Variance Extracted (AVE)* pada masing-masing indikator lebih dari 0,5 sehingga semua item variabel sudah memenuhi kriteria reabilitas yang telah ditentukan.

4.2.3 Pengujian Instrumen Penelitian Inner Model

Inner model atau model structural menggambarkan hubungan antara variabel berdasarkan pada teori substantif. Uji *inner model* pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *R Square*

Perubahan nilai *R square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel independent tertentu terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif. Apabila nilai *R square* 0,75 (kuat), 0,50 (moderate), dan 0,25 (lemah).

Tabel 4. 24

Hasil Uji *R Square*

	R Square	R Square Adjusted
Kinerja Pemerintah_	0,954	0,951
Kualitas Lap Keu	0,961	0,958

Hasil tabel di atas menunjukkan nilai *R Square Adjusted* untuk variabel kinerja pemerintah 95,1% yang berarti model sangat baik sedangkan sisanya dijelaskan variabel lain diluar yang diteliti. Nilai *R Square Adjusted* untuk variabel kualitas laporan keuangan 95,8% berarti model sangat baik sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti.

4.2.4 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji *path coefficient* pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Untuk menilai signifikan pada *path coefficient* dapat dilihat melalui *critical ratio* yang diperoleh dari *bootstrapping*. Uji *path coefficient* dapat diterima apabila nilai P Value kurang dari 0,05. Uji *path coefficient* pada penelitian ini yaitu:

Tabel 4. 25

Hasil Uji *Path Coefficient* Pengaruh Secara Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kompetensi_ -> Kinerja Pemerintah_	0,118	0,117	0,056	2,102	0,036
Akuntabilitas_ -> Kinerja Pemerintah_	0,089	0,092	0,042	2,123	0,034
Faktor Politik_ -> Kinerja Pemerintah_	0,113	0,112	0,053	2,121	0,034
Regulasi_ -> Kinerja Pemerintah_	0,225	0,232	0,093	2,429	0,015
Sistem Pengendalian Internal_ -> Kinerja Pemerintah_	0,133	0,137	0,058	2,286	0,023

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa uji *path coefficient* pengaruh secara langsung dapat dijelaskan bahwa:

1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja

Hasil dari uji *path coefficient* secara langsung pengaruh kompetensi terhadap kinerja menunjukkan bahwa nilai *P value* 0,036 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka H1 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi terhadap kinerja.

2. Pengaruh Regulasi terhadap Kinerja

Hasil dari uji *path coefficient* secara langsung pengaruh regulasi terhadap kinerja menunjukkan bahwa nilai *P value* 0,015 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka H2 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara regulasi terhadap kinerja.

3. Pengaruh Faktor Politik terhadap Kinerja

Hasil dari uji *path coefficient* secara langsung pengaruh faktor politik terhadap kinerja menunjukkan bahwa nilai *P value* 0,034 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka H3 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara faktor politik terhadap kinerja.

4. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja

Hasil dari uji *path coefficient* secara langsung pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja menunjukkan bahwa nilai *P value* 0,034 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka H4 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja.

5. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja

Hasil dari uji *path coefficient* secara langsung pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja menunjukkan bahwa nilai *P value* 0,023 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka H_5 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kinerja.

Tabel 4. 26

Hasil Uji *Path Coefficient* Pengaruh Tidak Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kompetensi_ -> Kualitas Lap Keu_ -> Kinerja Pemerintah_	0,144	0,144	0,041	3,507	0,000
Akuntabilitas_ -> Kualitas Lap Keu_ -> Kinerja Pemerintah_	0,086	0,087	0,042	2,055	0,040
Faktor Politik_ -> Kualitas Lap Keu_ -> Kinerja Pemerintah_	0,114	0,112	0,046	2,481	0,013
Regulasi_ -> Kualitas Lap Keu_ -> Kinerja Pemerintah_	0,517	0,524	0,067	7,727	0,000
Sistem Pengendalian Internal_ -> Kualitas Lap Keu_ -> Kinerja Pemerintah_	0,171	0,170	0,061	2,808	0,005

1. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja melalui Kualitas Laporan Keuangan

Hasil dari uji *path coefficient* secara tidak langsung pengaruh kompetensi terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai *P value* 0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka H_6 diterima. Sehingga

dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh Regulasi terhadap Kinerja melalui Kualitas Laporan Keuangan

Hasil dari uji *path coefficient* secara tidak langsung pengaruh regulasi terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai *P value* 0,000 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka H7 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara regulasi terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh Faktor Politik terhadap Kinerja melalui Kualitas Laporan Keuangan

Hasil dari uji *path coefficient* secara tidak langsung pengaruh faktor politik terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai *P value* 0,013 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka H8 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara faktor politik terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan.

4. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja melalui Kualitas Laporan Keuangan

Hasil dari uji *path coefficient* secara tidak langsung pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai *P value* 0,040 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka H9 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara akuntabilitas terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan.

5. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja melalui Kualitas Laporan Keuangan

Hasil dari uji *path coefficient* secara tidak langsung pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa nilai *P value* 0,005 lebih kecil dari 0,05, dengan ini maka H10 diterima. Sehingga dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kinerja melalui kualitas laporan keuangan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja

Variabel kompetensi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,036, maka nilai signifikansi variabel kompetensi lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menandakan bahwa variabel Kompetensi (X1) berpengaruh positif terhadap Kinerja. Sehingga hipotesis pertama (H1) terdukung.

Berdasarkan hasil tingkat pencapaian responden, responden setuju bahwa responden dapat menyelesaikan tugas dengan baik dengan pengetahuan yang dimilikinya, tingkat pencapaian sebesar 88%, responden setuju bahwa responden mampu bekerja sama dengan keterampilan yang dimilikinya, tingkat pencapaian sebesar 90%, responden setuju bahwa responden selalu bekerja dengan menerapkan etika dan kode etik, tingkat pencapaian sebesar 92%, responden setuju bahwa responden memiliki kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas, tingkat pencapaian sebesar 92%, responden setuju bahwa semakin tinggi

semangat yang dimiliki maka semakin tinggi pula kesempatan untuk berprestasi, tingkat pencapaian sebesar 90%.

Menurut *stewardship theory*, aparatur sebagai *steward* memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat (*principal*) dengan baik dan kompeten untuk memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya dimiliki oleh aparatur (Aprilya & Fitria, 2020).

Pada penelitian ini Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kinerja. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi seseorang maka akan semakin tinggi tingkat Kinerja Pemerintah. Kompetensi diidentifikasi dengan mereka yang berkinerja lebih baik, lebih konsisten dan efektif daripada mereka yang rata-rata atau bahkan sama sekali tidak kompeten dalam melakukan pekerjaannya. Maka pegawai yang berkompeten akan meningkatkan Kinerja Pemerintah (Utama, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hermawan (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi, pendelegasian wewenang, dan kepuasan kerja mempengaruhi kinerja aparatur sipil negara pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta penelitian Utama (2020) yang menyatakan bahwa pengendalian internal pemerintah dan kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang menyatakan bahwa Kompetensi tidak berpengaruh langsung terhadap Kinerja.

4.3.2 Pengaruh Regulasi terhadap Kinerja

Variabel Regulasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,015, maka nilai signifikansi variabel Regulasi lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menandakan bahwa variabel Regulasi (X2) berpengaruh positif terhadap Kinerja. Sehingga hipotesis kedua (H2) terdukung.

Berdasarkan hasil tingkat pencapaian responden, responden setuju bahwa sosialisasi regulasi dari pusat maupun daerah sudah diberikan, tingkat pencapaian sebesar 89%, responden setuju bahwa responden memahami UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tingkat pencapaian sebesar 93%, responden setuju bahwa UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sangat mudah dilaksanakan, tingkat pencapaian sebesar 94%, responden setuju bahwa instansi di tempat responden bekerja telah memberikan dukungan terhadap kemudahan pelaksanaan regulasi, tingkat pencapaian sebesar 91%, responden setuju bahwa regulasi pelayanan publik telah mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan, tingkat pencapaian sebesar 90%.

Berdasarkan teori *stewardship*, kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah), *steward* bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Studi ini menjelaskan keberadaan pemerintah daerah

(*steward*) sebagai lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kebaikan masyarakat (*principal*) (Rizal & Hermanto, 2019).

Pada penelitian ini Regulasi berpengaruh positif terhadap Kinerja. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerapan Regulasi yang memadai maka akan semakin tinggi tingkat Kinerja Pemerintah. Hal ini dikarenakan jika peraturan diterapkan dengan benar, maka informasi yang disampaikan kepada masyarakat akan terlaksanakan dengan benar atau transparan (Kuasa et al., 2016).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Idris & Konadi (2012) yang menyatakan bahwa semakin implementatifnya sebuah regulasi, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Kinerja yang berarti Regulasi berpengaruh positif terhadap Kinerja. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang menyatakan bahwa Regulasi tidak berpengaruh langsung terhadap Kinerja.

4.3.3 Pengaruh Faktor Politik terhadap Kinerja

Variabel Faktor Politik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,034, maka nilai signifikansi variabel Faktor Politik lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menandakan bahwa variabel Faktor Politik (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja. Sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima.

Berdasarkan hasil tingkat pencapaian responden, responden setuju bahwa OPD tempat mereka bekerja telah mampu mengelola dan menggunakan dana

alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk memperkecil ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat, tingkat pencapaian sebesar 86%, responden setuju bahwa responden telah menerapkan PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, tingkat pencapaian sebesar 86%, responden setuju bahwa adanya tuntutan terhadap laporan yang dihasilkan mesti dilaporkan dengan tepat waktu, akurat, dan akuntabel, tingkat pencapaian sebesar 83%, responden setuju bahwa mereka menyediakan informasi keuangan yang transparan, tingkat pencapaian sebesar 88%.

Menurut teori keagenan (*agency theory*), hubungan antara politisi dan masyarakat dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan, dimana masyarakat adalah prinsipal dan politisi adalah agen. Hubungan keagenan ini dapat menimbulkan masalah keagenan sehingga prinsipal mempunyai intensif untuk memantau perilaku agen. Rakyat mengharuskan pemerintah agar memberikan pertanggungjawabannya terhadap pengelolaan sumber daya yang rakyat percayakan kepada pemerintah dengan mekanisme pelaporan keuangan secara periodik dan transparansi (Zenita et al., 2021).

Merujuk pada penelitian Baber (1983) yang melakukan explanatory research untuk mengetahui pengaruh proses politik dalam keputusan untuk melaporkan informasi keuangan dalam laporan keuangan, penelitian tersebut mengasumsikan bahwa Setelah terpilih, politisi dapat mengabaikan perjanjian pra-pemilu tanpa takut akan pelengseran. Namun, perilaku oportunistik ini dapat

berkurang jika ada oposisi yang kuat yang menguasai kelompok di pemerintahan. Dalam hal ini, rival politik akan meminta untuk menginformasikan pendapat publik tentang penyimpangan tindakan pemerintah sehubungan dengan janji pemilu yang dibuat. Oleh karena itu, oposisi ini berfungsi untuk membendung penyimpangan kepentingan antara pemilih dan politisi. Akibatnya, politisi mungkin berkepentingan untuk menepati janji yang dibuat kepada pemilih jika mereka ingin terpilih kembali.

Semakin tinggi faktor ini maka semakin tinggi tingkat persaingan politik dan semakin baik pula hasil kinerja yang dilakukan (Davici, 2018). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang menyatakan bahwa Faktor Politik tidak berpengaruh langsung terhadap Kinerja.

4.3.4 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja

Variabel Akuntabilitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,034, maka nilai signifikansi variabel Akuntabilitas lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menandakan bahwa variabel Akuntabilitas (X4) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Kinerja. Sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.

Berdasarkan hasil data, tingkat pencapaian responden sebesar 81% yang menyatakan bahwa terdapat teguran maupun sanksi kepada setiap pegawai apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas, tingkat pencapaian responden sebesar 82% yang menyatakan bahwa adanya sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi yang memadai, tingkat

pencapaian responden sebesar 83% yang menyatakan bahwa terdapat pertanggungjawaban instansi terhadap proses penyusunan serta pelaksanaan program yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan, tingkat pencapaian responden sebesar 85% yang menyatakan bahwa terdapat pertanggungjawaban atas penetapan tujuan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi serta dampak yang ditimbulkan, tingkat pencapaian responden sebesar 84% yang menyatakan bahwa instansi tempat mereka bekerja mampu mempublikasikan laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK kepada masyarakat.

Menurut *Stewardship Theory*, selaku *steward* dalam hal ini adalah pemerintah dengan fungsi pengelola sumber daya dan yang menjadi *principal* adalah rakyat selaku pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi (Jatmiko, 2020). Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah sebagai pemegang amanah (*steward*) untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada rakyat sebagai pihak pemberi amanah (*principal*) dengan mengungkap segala informasi, baik keberhasilan maupun kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut (Novatiani et al., 2019).

Menurut Edowai et al. 2021, semakin baik pelaksanaan akuntabilitas maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik. Hal ini karena akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh

keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil kinerjanya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Jatmiko (2020) yang menyatakan bahwa pengawasan internal, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Edowai et al. (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. Penelitian Novatiani et al. (2019) yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian Binawati & Badriyah (2022) menyatakan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

4.3.5 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja

Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023, maka nilai signifikansi variabel Sistem Pengendalian Internal lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menandakan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X5) berpengaruh positif terhadap Kinerja. Sehingga hipotesis kelima (H5) terdukung.

Berdasarkan hasil tingkat pencapaian responden, responden setuju bahwa pimpinan selalu melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern serta melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan

barang, tingkat pencapaian sebesar 86%, responden setuju bahwa pimpinan telah melakukan analisa resiko secara lengkap dan menyeluruh, tingkat pencapaian sebesar 87%, responden setuju bahwa setiap transaksi yang dilakukan memiliki bukti pendukung sebelum dilakukan pencatatan, tingkat pencapaian sebesar 89%, responden setuju bahwa instansi telah menyediakan informasi secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat, tingkat pencapaian sebesar 87%, responden setuju bahwa saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekan, dan aparat pengawasan intern dalam memberikan masukan signifikan, tingkat pencapaian sebesar 89%, responden setuju bahwa pimpinan selalu meninjau setiap hasil/revisi dan saran dari BPK/Inspektorat, tingkat pencapaian sebesar 89%.

Dalam teori *stewardship*, dijelaskan bahwa sifat individu dapat berperilaku jujur kepada pihak-pihak lainnya, dapat dipercaya, serta memiliki integritas (Ikriyati & Aprilia, 2019). Sistem pengendalian internal pemerintah dimana pemerintah bertanggung jawab memonitor aktivitas yang dilakukan dan akan menghasilkan kinerja yang berkualitas untuk kepuasan prinsipal, oleh karena itu pemerintah melakukan sistem pengendalian internal dengan cara mengontrol semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan (Yudhasena & Putri, 2019).

Pada penelitian ini Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi penerapan Sistem Pengendalian Internal yang memadai maka akan semakin tinggi tingkat Kinerja

Pemerintah. Hal ini dikarenakan pengendalian internal mempermudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga dapat menghasilkan Kinerja yang baik (Mokoginta et al., 2017).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yudhasena & Putri (2019) yang menyatakan bahwa *good government governance*, pengendalian internal, dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Penelitian Fitdina Aprianto et al. (2020) menyatakan bahwa sistem informasi kepegawaian dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Penelitian Utama (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja.

4.3.6 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Kompetensi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kualitas Laporan Keuangan dapat memediasi antara Kompetensi terhadap Kinerja melalui uji *path coefficient* secara tidak langsung. Dari uji tersebut menunjukkan bahwa Kualitas laporan Keuangan memediasi hubungan antara Kompetensi terhadap Kinerja.

Berdasarkan teori *stewardship*, aparat dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan cara melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan

kepadanya, sehingga pelayanan publik kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *steward* (pembuat laporan keuangan) memiliki kompeten untuk mengarahkan semua kemampuan dengan mengefektifkan pengendalian internal dan teknologi informasi (Fauziyah, 2019). Dalam penelitian ini sumberdaya yang berkompeten akan dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan akan menghasilkan kinerja yang baik (Kuasa et al., 2016).

Jika sumber daya manusia memiliki kompetensi yang baik maka laporan keuangan akan mengalami minim kekeliruan. Dengan adanya pegawai yang kompeten, maka akan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan dan akan berpengaruh terhadap tingginya Kinerja Pemerintah (Alminanda & Marfuah, 2018).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan mampu memediasi antara kompetensi, regulasi, dan faktor politik terhadap kinerja.

4.3.7 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Regulasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kualitas Laporan Keuangan dapat memediasi antara Regulasi terhadap Kinerja melalui uji *path*

coefficient secara tidak langsung. Dari uji tersebut menunjukkan bahwa Kualitas laporan Keuangan memediasi hubungan antara Regulasi terhadap Kinerja.

Berdasarkan teori *stewardship*, kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah), *steward* bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi (Rizal & Hermanto, 2019). Pemerintah daerah (*steward*) menaati regulasi yang ditetapkan maka akan menciptakan pertanggungjawaban keuangan publik, hal ini akan meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas dan menghasilkan kinerja yang baik (Idris & Konadi, 2012).

Semakin tinggi penerapan regulasi yang memadai, maka kinerja pemerintah yang dihasilkan melalui kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Hal ini dikarenakan semakin lengkapnya prosedur regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD maka akan menjadi lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan dan menghasilkan laporan yang berkualitas dan akan terhadap tingginya Kinerja Pemerintah (Kuasa et al., 2016).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan mampu memediasi antara kompetensi, regulasi, dan faktor politik terhadap kinerja.

4.3.8 Pengaruh peran Kualitas Laporan keuangan dalam memediasi hubungan antara Faktor Politik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kualitas Laporan Keuangan dapat memediasi antara Faktor Politik terhadap Kinerja melalui uji

path coefficient secara tidak langsung. Dari uji tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan mampu memediasi hubungan antara Faktor Politik terhadap Kinerja.

Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), hubungan antar politisi dan pemilih (*voter*) dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan, dimana voter adalah prinsipal dan politisi adalah agen (Zenita et al., 2021). Hubungan keagenan ini dapat menimbulkan masalah keagenan yaitu asimetri informasi. Pelaporan keuangan melalui berbagai media yang dilakukan oleh politisi (*agent*) merupakan sebuah upaya untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Hal ini bertujuan agar terciptanya transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah untuk mengurangi asimetri informasi serta untuk mengawasi perilaku politisi (*agent*) dan menyelaraskan tujuan antara prinsipal dengan agen sehingga menciptakan kinerja yang baik (Davici, 2018).

Faktor politik berperan dalam menekankan organisasi dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan dengan cara memberikan tekanan kepada pejabat terkait organisasi tersebut dan menerapkan sebuah kebijakan yang berguna dalam upaya penerapan transparansi keuangan (Zenita et al., 2021). Dengan demikian penerapan transparansi dalam hal laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas kinerja melalui laporan keuangan. Sejalan dengan penelitian Nirwana & Haliah (2018) yang menyatakan bahwa kualitas laporan

keuangan mampu memediasi antara kompetensi, regulasi, dan faktor politik terhadap kinerja.

4.3.9 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kualitas Laporan Keuangan dapat memediasi antara Akuntabilitas terhadap Kinerja melalui uji *path coefficient* secara tidak langsung. Dari uji tersebut menunjukkan bahwa Kualitas laporan Keuangan memediasi hubungan antara Akuntabilitas terhadap Kinerja.

Hubungan teori stewardship terhadap penelitian ini adalah dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah (steward) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (principal). Pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akan meningkatkan kinerja instansi (Jatmiko, 2020).

Akuntabilitas yang terdefinisi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kejelasan transaksi data melalui pembuktian tertulis atas pencatatan yang dilakukan secara actual agar terhindar dari kecurangan (Sastra et al, 2015). Semakin baik pelaksanaan akuntabilitas suatu perangkat daerah, maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik melalui kualitas laporan keuangan. Hal ini

dikarenakan implementasi prinsip akuntabilitas akan mendorong nilai kualitas laporan keuangan menjadi meningkat dan berpengaruh terhadap tingginya kinerja pemerintah daerah (Edowai et al., 2021).

4.3.10 Pengaruh peran Kualitas Laporan Keuangan dalam memediasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Kualitas Laporan Keuangan dapat memediasi antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja melalui uji *path coefficient* secara tidak langsung. Dari uji tersebut menunjukkan bahwa Kualitas laporan Keuangan memediasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja.

Sistem pengendalian intern dikaitkan dengan teori *stewardship* menggambarkan struktur yang memfasilitasi dan memberdayakan pengendalian intern menjadi efektif guna menghasilkan tingkat kemandirian keuangan yang baik. Sistem pengendalian intern yang efektif akan menjamin pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran (Dewi, 2017).

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan proses dan tahap-tahap yang harus dilalui yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi di dalamnya mengatur tentang sistem

pengendalian intern (SPI), kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidaknya sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah (Ikriyati & Aprila, 2019). Semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, maka pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akan mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah (Mahmudi, 2011).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisi data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Regulasi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
3. Faktor Politik berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
4. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
5. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Kompetensi terhadap Kinerja.
7. Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Regulasi terhadap Kinerja.
8. Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Faktor Politik terhadap Kinerja.
9. Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Akuntabilitas terhadap Kinerja.
10. Kualitas Laporan Keuangan mampu memediasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian di antaranya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner tanpa disertai wawancara atau pertanyaan lisan sehingga data yang diperoleh mungkin belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

5.3 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya lebih baik menambah variabel lain yang mungkin mempengaruhi kinerja.
2. Agar mendapatkan suatu model penelitian yang baik dengan didukung oleh teori yang kuat disarankan untuk lebih memperbanyak referensi penelitian yang mampu mendukung topik yang diteliti.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan metode wawancara kepada responden agar mendapatkan hasil yang lebih baik.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas populasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- afifi, Z., & Nugroho, D. H. (2018). Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten Kudus. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.33603/Jka.V2i1.1241>
- Alminanda, P., & Marfuah, M. (2018). Peran Komitmen Organisasi Dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(2), 117–132. <https://doi.org/10.31603/Bisnisekonomi.V16i2.2620>
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Azlina, N. (2019). Good Governance Memediasi Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Opd Kabupaten Solok). *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 9–24. <https://doi.org/10.37301/Jkaa.V14i1.5>
- Azlina, N., & Amelia, I. (2015). Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2), 32. <https://doi.org/10.19184/Jauj.V12i2.1409>
- Baber, W. R. (1983). Toward Understanding The Role Of Auditing In The Public Sector. *Journal Of Accounting And Economics*, 5(C), 213–227. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(83\)90013-7](https://doi.org/10.1016/0165-4101(83)90013-7)
- Baber, W. R., & Sen, P. K. (1984). The Role Of Generally Accepted Reporting Methods In The Public Sector: An Empirical Test. *Journal Of Accounting And Public Policy*, 3(2), 91–106. [https://doi.org/10.1016/0278-4254\(84\)90002-4](https://doi.org/10.1016/0278-4254(84)90002-4)
- Binawati, E., & Badriyah, N. (2022). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(1), 32–49. <https://doi.org/10.32477/Jrabi.V2i1.419>
- Damayanti, E., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(3), 1–21.
- Davici, N. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Pimpinan Dan Faktor Politik Terhadap Transparansi Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam). *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–20.

- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal Of Business And Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Fardian, D. (2014). Pengaruh Faktor Politik, Ketidakpastian Lingkungan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Atas Skpd Pemerintah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–18.
- Fauziyah, E. M. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah Di K. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(2), 196–209. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i2.6386>
- Fiqri, A. A., & Sari, I. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor The Effect Of Local Financial Management And Government Internal Control System On Local Government Performance Of The Bogo. *Majalah Sainstekes*, 5(2), 79–090.
- Fitdina Aprianto, Ngadisah, & Sampara Lukman. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang Provinsi Banten. *Visioner : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(4), 663–674. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.327>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss*. 26. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herachwati, N., & S, A. D. (2012). Kompetensi Dan Kinerja Karyawan Bagian Pemasaran. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan/ Journal Of Theory And Applied Management*, 5(1), 56–64. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v5i1.2553>
- Herawati, E., Malisan, L., & Kusumawardani, A. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 1(1), 12–19. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/jiam/issue/view/55%0apengaruh>
- Hermawan, E. (2019). Pengaruh Kompetensi, Pendelegasian Wewenang Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja | Hermawan | Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(2), 148–159.

[Http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/maneggio/article/view/2235/3930](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/maneggio/article/view/2235/3930)

- Idris, A., & Konadi, W. (2012). Pengaruh Regulasi Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Kinerja Pelayanan Aparatur Skpd Dan Implikasinya Pada Kualitas Pelayanan Publik Di Provinsi Aceh. *Jurnal Kebangsaan*, 1(1), 11–21.
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Irafah, S., Nurmala Sari, E., & Muhyarsyah. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, Dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337–348.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231–246. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- Kuasa, Nadirsyah, & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(2), 47–56.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Uii Press.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiyah, A. A. (2002). Dampak Proses Politik Dan Konsekuensi Ekonomi Dalam Pembentukan Suatu Standar. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 3(2), 96–123. <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/809/933>
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890. <https://doi.org/10.32520/jak.v10i1.1658>
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2021). Pengaruh Kompetensi, Lingkungan Kerja Dan Motivasi Berprestasi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kota Padang. *Jiee: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 01(1), 1–24.
- Nirwana, & Haliah. (2018). Determinant Factor Of The Quality Of Financial Statements And Performance Of The Government By Adding Contextual

- Factors: Personal Factor, System/Administrative Factor. *Asian Journal Of Accounting Research*, 3(1), 28–40. <https://doi.org/10.1108/Ajar-06-2018-0014>
- Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/Jimb.V10i1.15983>
- Nugroho, P. S., & Sumiyanti, T. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Dan Politik Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (Jimat)*, 8(2), 104–118.
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87–97. <https://doi.org/10.37403/Financial.V6i1.135>
- Rizal, N. A. A., & Hermanto, S. B. (2019). The Role Of Organizational Commitment Mediates The Effect Of Leadership Style And Competence On Village Government Accountability. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(1), 2–16.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1), 14–33. <https://doi.org/10.29313/Bcsa.V2i1.625>
- Siswanto. (2007). Politik Dalam Organisasi (Suatu Tinjauan Menuju Etika Berpolitik). *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 10(4), 159–165. <https://jurnal.ugm.ac.id/index.php/jmpk/article/view/2720>
- Soegiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Utama, D. P. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun. *Journal Of Applied Accounting And Taxation*, 5(1), 101–106. <https://doi.org/10.30871/Jaat.V5i1.1449>
- Yudhasena, I. G. I., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2019). Pengaruh Good Government Governance, Pengendalian Intern, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Opd). *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 434. <https://doi.org/10.24843/Eja.2019.V28.I01.P17>
- Zenita, V., Basri, Y. M., & Rofika. (2021). *Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 22(1), 88–108.

<https://suarabanyumas.com/nilai-sakip-pemkab-banyumas-tertinggi-di-jateng/>
Diakses pada 8 Juni 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Oktober				November				Desember				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul skripsi		√														
2.	Pengumuman pengajuan judul skripsi				√												
3.	Bimbingan kepada dosen pembimbing skripsi				√	√			√		√			√			
4.	Review jurnal				√												
5.	Penyusunan proposal skripsi					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6.	Pendaftaran proposal skripsi																
7.	Seminar proposal																
8.	Pengumpulan data																
9.	Penulisan akhir skripsi																
10.	Pendaftaran munaqosah																
11.	Sidang munaqosah																
12.	Revisi skripsi																

No	Keterangan	Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul skripsi																
2.	Pengumuman pengajuan judul skripsi																
3.	Bimbingan kepada dosen pembimbing skripsi	√															
4.	Review jurnal																
5.	Penyusunan proposal skripsi																
6.	Pendaftaran proposal skripsi	√															
7.	Seminar proposal						√										
8.	Pengumpulan data							√									
9.	Penulisan akhir skripsi										√						
10.	Pendaftaran munaqosah												√				
11.	Sidang munaqosah													√			
12.	Revisi skripsi													√			

Lampiran 2

Kuesioner Penelitian

Asssalamu'alaikum Wr. Wb

Kepada Yth,

Bapak/Ibu di tempat

Saya Jihan Fadiyah Safitri Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Akuntansi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, memohon kepada Bapak/Ibu untuk meluangkan waktunya mengisi kuisisioner penelitian saya yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Regulasi, Faktor Politik, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)”. Kuisisioner ini dibuat sebagai sarana dalam rangka mendukung pembuatan proposal skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Sehubungan dengan hal tersebut saya mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian secara objektif. Data yang Bapak/Ibu isikan akan dijaga kerahasiannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian saya. Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Saya



(Jihan Fadiyah Safitri)

A. Identitas Responden

Nama Instansi/Lembaga :

:

Nama Responden :(boleh tidak di isi)

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Usia : <25 Tahun 26-35 Tahun

36-45 Tahun >46 Tahun

Pendidikan Terakhir : SLTA D3 D4

S1 S2 S3

Latar Belakang Pendidikan: Akuntansi Manajemen

IT Lainnya

Jabatan : Pimpinan Sekretaris

Kabag/Kabid Kasubag/Kasubid

Lama Bekerja di OPD : <5 Tahun 6-15 Tahun

16-25 Tahun >25 Tahun

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Dimohon Bapak/Ibu untuk membaca setiap pernyataan kuisisioner secara hati-hati dan menjawab pernyataan dalam kuisisioner ini dengan lengkap. Berikut ini merupakan pernyataan-pernyataan yang mewakili pendapat-pendapat umum mengenai kondisi di dalam instansi Bapak/Ibu. Tidak ada pernyataan yang benar atau salah. Bapak/Ibu mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut dengan memberi *checklist* atau tanda centang (√) pada pilihan kolom yang tersedia. Kuisisioner ini terdapat 5 pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataan, yaitu:

1 = Sangat tidak setuju (STS)

4 = Setuju (S)

2 = Tidak setuju (TS)

5 = Sangat Setuju (SS)

3 = Netral (N)

Catatan: Mengisi pilihan netral jika Bapak/Ibu tidak mengetahui atau tidak memahami pernyataan yang dimaksud atau belum pernah mengalami.

A. Kinerja (Y)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Ekonomis						
1.	Setiap program kerja yang dilaksanakan dikelola secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan.					
Efisiensi						
2.	Setiap program kerja yang dilaksanakan dikelola dengan anggaran secara efisien					
Efektivitas						
3.	Setiap program kerja yang dilaksanakan dikelola secara efektif sesuai dengan target yang direncanakan					

B. Kompetensi (X_1)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)

Pengetahuan (<i>knowledge</i>)					
1.	Dengan pengetahuan yang saya miliki, saya dapat menyelesaikan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan dan prosedur kerja yang ada.				
Keterampilan (<i>skill</i>)					
2.	Dengan keterampilan yang saya miliki saya, mampu bekerja sama dengan rekan kerja.				
Konsep Diri (<i>self concept</i>)					
3.	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai.				
Sifat (<i>traits</i>)					
4.	Dalam bekerja, saya memiliki kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas.				
Motif (<i>motives</i>)					
5.	Semakin tinggi semangat yang saya miliki semakin tinggi pula kesempatan saya untuk berprestasi.				

C. Regulasi (X_2)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Proses penyusunan regulasi						
1.	Sosialisasi penyusunan regulasi dari pusat maupun daerah yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan daerah sudah diberikan.					
2.	Saya memahami UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.					
Penerapan regulasi						

3.	UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sangat mudah dilaksanakan.					
Keterkaitan antar regulasi						
4.	Instansi di tempat saya bekerja telah memberikan dukungan terhadap kemudahan pelaksanaan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat.					
Evaluasi regulasi						
5.	Regulasi pelayanan publik dari pusat dan daerah telah mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan.					

D. Faktor Politik (X₃)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Ketergantungan pada pusat						
1.	OPD pada tempat saya bekerja telah mampu mengelola dan menggunakan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) secara efektif dan efisien untuk memperkecil ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat.					
Ketaatan menjalankan peraturan perundang-undangan						
2.	Dalam bekerja, saya telah menerapkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.					
Tekanan dari pimpinan jabatan politik						
3.	Adanya tuntutan dari pimpinan terkait laporan yang dihasilkan mesti disampaikan tepat waktu, akurat, dan akuntabel.					

Pemberitaan akan transparansi					
4.	Dalam bekerja, saya menyediakan informasi keuangan yang transparan dan berdampak positif bagi SKPD.				

E. Akuntabilitas (X₄)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Akuntabilitas hukum dan kejujuran						
1.	Instansi di tempat saya bekerja terdapat teguran maupun sanksi kepada setiap pegawai apabila terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas.					
Akuntabilitas manajerial						
2.	Instansi di tempat saya bekerja mampu menjamin adanya sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi yang memadai.					
Akuntabilitas program						
3.	Instansi di tempat saya bekerja mampu mempertanggungjawabkan atas proses penyusunan serta pelaksanaan program yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan.					
Akuntabilitas kebijakan						
4.	Instansi di tempat saya bekerja mampu mempertanggungjawabkan atas penetapan tujuan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi serta dampak yang ditimbulkan.					
Akuntabilitas financial						

5.	Instansi di tempat saya bekerja mampu mempublikasikan laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh BPK kepada masyarakat.					
----	---	--	--	--	--	--

F. Sistem Pengendalian Internal (X₅)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Lingkungan pengendalian						
1.	Pimpinan OPD selalu melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern serta melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang.					
Penilaian resiko						
2.	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.					
Kegiatan Pengendalian						
3.	Setiap transaksi memiliki bukti pendukung sebelum dilakukannya pencatatan.					
Informasi dan Komunikasi						
4.	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat.					
5.	Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan.					
Pemantauan						

6.	Pimpinan selalu meninjau setiap hasil/reviu dan saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat.					
----	--	--	--	--	--	--

G. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Z)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Relevan						
1.	Laporan keuangan di tempat saya bekerja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.					
Andal						
2.	Informasi laporan keuangan di tempat saya bekerja telah disusun dengan jujur serta bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
3.	Informasi laporan keuangan di tempat saya bekerja telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah.					
Dapat dibandingkan						
4.	Informasi laporan keuangan di tempat saya bekerja selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
Dapat dipahami						
5.	Informasi laporan keuangan di tempat saya bekerja, disajikan dengan jelas dan sistematis sehingga dapat dipahami oleh pengguna.					

Lampiran 3

Rekap Kuesioner

No	Kompetensi					TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	4	4	5	5	5	23
3	4	4	5	5	4	22
4	5	5	5	4	5	24
5	4	4	5	5	4	22
6	5	5	4	4	4	22
7	4	4	4	5	5	22
8	5	5	5	4	4	23
9	5	4	5	5	5	24
10	4	5	4	4	4	21
11	4	4	4	4	5	21
12	5	5	5	4	4	23
13	5	4	5	5	4	23
14	4	5	5	4	4	22
15	4	4	5	4	4	21
16	5	5	4	4	4	22
17	4	4	5	5	5	23
18	4	5	5	5	5	24
19	4	4	4	5	5	22
20	4	4	5	4	5	22
21	4	5	5	4	5	23
22	4	4	4	4	4	20
23	4	5	5	4	4	22
24	4	4	4	4	4	20
25	5	4	4	4	5	22
26	5	4	4	4	5	22
27	4	4	4	5	4	21
28	4	5	5	4	4	22
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	5	5	4	22
31	5	5	5	5	5	25
32	5	5	5	5	5	25
33	4	4	5	4	5	22
34	5	5	5	4	3	22

35	5	5	5	5	4	24
36	4	4	4	5	4	21
37	5	4	5	4	4	22
38	5	5	5	5	5	25
39	5	5	5	5	4	24
40	4	4	4	5	5	22
41	4	5	5	4	4	22
42	5	5	4	4	5	23
43	4	4	4	5	5	22
44	5	5	5	5	5	25
45	5	4	4	5	5	23
46	5	5	5	5	5	25
47	4	4	4	5	4	21
48	5	5	5	5	5	25
49	5	5	5	5	5	25
50	5	5	5	5	5	25
51	5	5	5	5	5	25
52	4	5	5	5	5	24
53	4	5	4	4	4	21
54	4	5	4	4	4	21
55	3	5	5	4	4	21
56	4	4	4	4	5	21
57	3	3	4	5	5	20
58	5	5	5	5	4	24
59	5	4	4	5	5	23
60	5	4	4	5	5	23
61	4	5	5	4	4	22
62	5	4	4	4	5	22
63	4	4	4	5	5	22
64	5	5	5	4	4	23
65	4	4	4	5	4	21
66	4	4	4	5	4	21
67	5	4	5	5	4	23
68	4	5	5	5	5	24
69	5	5	5	5	5	25
70	5	4	4	5	5	23
71	4	4	4	4	5	21
72	5	5	5	5	4	24
73	4	4	5	5	5	23
74	5	5	5	5	5	25
75	4	4	5	4	4	21

76	3	4	4	4	3	18
77	3	4	4	4	3	18
78	4	4	5	5	5	23
79	5	5	5	5	5	25
80	4	4	4	4	3	19
81	4	5	5	5	5	24
82	5	5	5	5	5	25
83	3	4	5	5	5	22
84	4	4	5	5	5	23
85	5	5	5	5	4	24
86	5	5	5	5	5	25
87	5	5	4	3	5	22
88	3	4	4	5	5	21
89	5	5	5	5	5	25
90	5	5	5	5	5	25
91	4	5	5	5	4	23
92	5	4	5	5	4	23
93	4	4	4	4	4	20
94	5	4	5	5	5	24
95	5	5	5	5	5	25
96	4	5	4	4	5	22
97	4	4	5	4	4	21

No	Regulasi					TOTAL X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	4	20
8	5	5	5	5	5	25
9	4	5	5	4	5	23
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	5	5	22
12	4	4	4	4	5	21
13	4	4	4	4	4	20
14	4	5	5	5	4	23

15	3	3	3	4	4	17
16	4	4	4	4	4	20
17	3	3	3	4	4	17
18	3	4	3	5	4	19
19	4	3	4	5	5	21
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	5	4	4	21
24	4	4	4	4	4	20
25	4	5	5	4	5	23
26	4	4	4	4	4	20
27	4	5	5	4	5	23
28	4	4	5	4	4	21
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	5	5	5	23
32	4	4	5	5	5	23
33	4	4	4	4	4	20
34	3	4	4	4	4	19
35	4	4	5	4	4	21
36	4	4	4	4	4	20
37	4	5	5	5	5	24
38	4	4	4	5	5	22
39	5	4	5	5	5	24
40	4	4	4	3	4	19
41	4	4	4	4	4	20
42	4	5	4	5	4	22
43	4	4	4	4	4	20
44	5	5	5	5	5	25
45	4	5	5	4	4	22
46	4	4	5	4	4	21
47	4	4	4	4	4	20
48	4	5	5	4	4	22
49	4	4	5	5	5	23
50	4	4	4	4	3	19
51	4	4	4	4	4	20
52	5	4	3	5	5	22
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	4	4	20
55	3	2	3	5	4	17

56	4	5	4	4	4	21
57	3	2	3	5	4	17
58	4	5	5	4	5	23
59	5	5	4	5	5	24
60	4	4	3	4	4	19
61	4	4	4	4	4	20
62	4	4	4	5	4	21
63	4	4	4	4	4	20
64	5	5	4	5	5	24
65	5	4	4	4	5	22
66	5	5	5	4	5	24
67	4	4	5	4	4	21
68	4	4	4	5	4	21
69	4	5	5	5	5	24
70	4	4	4	5	5	22
71	4	4	4	4	4	20
72	4	5	5	4	4	22
73	3	3	3	4	4	17
74	4	3	3	4	4	18
75	4	4	4	4	4	20
76	3	3	3	4	4	17
77	3	4	4	4	3	18
78	4	4	4	4	4	20
79	4	4	4	5	5	22
80	4	4	4	4	4	20
81	5	4	4	5	5	23
82	4	4	4	5	4	21
83	3	3	3	3	3	15
84	4	4	4	4	4	20
85	5	4	3	3	3	18
86	5	4	4	5	5	23
87	4	3	3	4	4	18
88	4	4	4	4	4	20
89	5	5	5	5	5	25
90	4	4	4	4	5	21
91	5	5	5	5	5	25
92	4	4	4	4	4	20
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	4	4	4	20
95	3	4	4	4	3	18
96	4	5	5	4	4	22

No	Faktor Politik				TOTAL X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
1	5	5	5	4	19
2	4	4	5	5	18
3	5	5	5	5	20
4	5	5	5	5	20
5	4	5	5	5	19
6	4	4	4	4	16
7	5	5	5	5	20
8	4	4	5	5	18
9	4	5	5	5	19
10	5	5	4	4	18
11	5	4	5	5	19
12	5	4	4	5	18
13	4	5	4	5	18
14	5	5	4	5	19
15	5	3	5	5	18
16	5	5	5	5	20
17	5	4	5	4	18
18	5	5	5	5	20
19	3	5	5	5	18
20	5	5	5	4	19
21	4	5	5	5	19
22	5	5	5	5	20
23	5	4	5	5	19
24	4	5	5	5	19
25	5	5	5	5	20
26	5	4	4	5	18
27	4	5	5	5	19
28	4	5	4	4	17
29	5	5	3	5	18
30	5	5	5	5	20
31	5	5	5	5	20
32	5	5	5	5	20
33	4	5	5	4	18
34	3	5	3	5	16
35	5	5	5	5	20

36	4	4	4	4	16
37	5	5	5	5	20
38	5	5	5	5	20
39	4	5	5	5	19
40	5	3	5	5	18
41	4	5	5	5	19
42	5	5	5	4	19
43	5	5	5	5	20
44	5	5	5	5	20
45	4	5	5	5	19
46	5	5	5	5	20
47	5	5	4	4	18
48	5	5	5	4	19
49	5	5	5	4	19
50	3	5	5	5	18
51	5	5	5	5	20
52	5	4	5	5	19
53	4	4	4	4	16
54	3	5	5	5	18
55	5	5	5	5	20
56	4	5	4	5	18
57	5	5	3	5	18
58	5	5	5	5	20
59	5	5	5	5	20
60	4	5	5	5	19
61	5	5	4	5	19
62	4	4	5	5	18
63	5	5	4	4	18
64	4	4	5	5	18
65	4	4	5	5	18
66	4	4	5	5	18
67	5	4	4	5	18
68	5	4	5	5	19
69	5	5	5	5	20
70	5	5	5	4	19
71	5	5	5	4	19
72	5	5	5	5	20
73	5	5	5	5	20
74	5	4	5	5	19
75	4	4	5	5	18
76	5	3	5	5	18

77	4	4	5	5	18
78	4	5	5	4	18
79	5	5	5	5	20
80	5	4	5	5	19
81	5	5	5	5	20
82	5	4	4	5	18
83	5	3	5	5	18
84	3	3	5	5	16
85	5	5	5	5	20
86	5	5	5	5	20
87	4	4	4	4	16
88	5	5	5	4	19
89	5	5	5	5	20
90	5	5	5	5	20
91	5	5	5	5	20
92	5	5	5	5	20
93	5	5	5	5	20
94	4	5	5	4	18
95	5	4	5	4	18
96	4	5	5	4	18
97	5	5	5	4	19

No	Akuntabilitas					TOTAL X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
1	5	5	5	4	5	24
2	5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	4	5	24
4	4	5	5	5	4	23
5	5	5	4	4	5	23
6	4	4	4	4	4	20
7	5	5	4	5	4	23
8	5	5	5	5	5	25
9	5	5	4	5	5	24
10	5	5	5	4	4	23
11	5	5	5	5	4	24
12	5	4	4	5	4	22
13	5	5	5	5	5	25
14	4	4	5	5	4	22
15	5	5	5	5	3	23

16	5	5	4	4	4	22
17	4	4	5	5	4	22
18	5	5	5	5	5	25
19	5	5	5	5	5	25
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	5	5	5	23
22	5	5	5	5	4	24
23	5	5	5	5	5	25
24	4	5	5	4	4	22
25	4	4	4	5	5	22
26	5	5	5	5	5	25
27	5	5	5	5	5	25
28	5	5	5	5	5	25
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	5	5	5	5	5	25
32	5	5	5	5	5	25
33	4	4	5	4	4	21
34	3	5	5	3	3	19
35	5	5	5	4	5	24
36	5	5	5	5	5	25
37	5	4	5	4	4	22
38	5	5	5	5	5	25
39	5	5	5	5	5	25
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	5	5	5	23
42	4	5	5	4	4	22
43	4	5	5	5	4	23
44	5	5	5	5	5	25
45	5	5	5	4	4	23
46	5	4	5	5	5	24
47	5	4	4	4	4	21
48	5	5	5	5	5	25
49	5	5	5	5	4	24
50	5	5	4	4	5	23
51	5	5	5	5	5	25
52	4	5	4	4	4	21
53	4	4	4	4	4	20
54	5	3	5	4	5	22
55	3	5	5	5	3	21
56	4	5	4	5	5	23

57	3	4	5	5	5	22
58	4	5	5	5	4	23
59	4	5	5	4	5	23
60	5	5	4	4	4	22
61	4	4	5	5	5	23
62	5	5	5	5	5	25
63	4	5	5	4	4	22
64	4	5	5	5	5	24
65	4	5	5	5	5	24
66	4	5	5	5	5	24
67	4	4	5	5	5	23
68	4	5	5	4	4	22
69	5	5	5	5	5	25
70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	5	5	4	22
73	5	5	5	5	3	23
74	5	5	5	5	5	25
75	4	4	4	4	5	21
76	4	4	4	4	5	21
77	4	4	4	4	5	21
78	5	5	4	4	4	22
79	4	5	5	5	4	23
80	4	5	5	4	4	22
81	5	5	5	5	5	25
82	4	4	4	4	4	20
83	3	3	5	3	3	17
84	4	5	5	4	4	22
85	4	4	4	5	5	22
86	5	5	5	5	5	25
87	5	5	5	3	5	23
88	4	4	4	5	5	22
89	5	5	5	5	5	25
90	5	5	5	5	5	25
91	5	5	5	5	5	25
92	4	4	4	4	4	20
93	5	5	5	5	5	25
94	4	5	5	4	5	23
95	4	5	4	5	5	23
96	4	5	4	5	4	22
97	5	5	4	4	5	23

No	SPI						TOTAL X5
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	
1	5	5	5	5	5	4	29
2	5	5	4	4	4	4	26
3	4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	5	5	4	27
5	5	5	5	4	4	4	27
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	4	4	4	4	4	24
8	4	4	4	4	4	4	24
9	4	5	5	4	5	5	28
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	5	4	4	5	26
12	4	4	5	4	4	5	26
13	5	5	5	5	5	5	30
14	4	5	4	4	4	5	26
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	4	4	4	4	24
17	4	4	4	3	4	5	24
18	5	5	5	5	4	5	29
19	5	5	5	5	5	5	30
20	3	4	4	4	4	4	23
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	5	5	5	4	4	27
23	5	5	4	4	4	4	26
24	4	4	5	5	5	4	27
25	5	5	4	4	4	4	26
26	4	4	5	4	4	4	25
27	4	4	5	4	4	4	25
28	5	5	4	4	4	4	26
29	3	3	4	4	4	4	22
30	4	4	4	4	4	4	24
31	5	5	5	5	5	5	30
32	5	5	4	4	5	4	27
33	5	5	4	5	5	4	28
34	4	4	4	4	4	4	24
35	5	5	5	5	5	5	30
36	4	4	4	4	4	4	24

37	5	5	4	4	4	5	27
38	4	5	5	5	5	5	29
39	5	5	5	5	5	5	30
40	4	3	4	4	4	4	23
41	4	4	5	4	4	5	26
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	4	4	4	4	4	24
44	5	5	5	5	5	5	30
45	5	5	5	5	5	5	30
46	5	4	4	5	5	5	28
47	4	4	4	5	5	5	27
48	4	5	4	4	4	4	25
49	5	4	5	5	5	5	29
50	5	5	5	5	5	5	30
51	5	5	5	5	5	5	30
52	5	5	4	5	4	5	28
53	4	4	4	4	4	4	24
54	4	3	5	4	4	5	25
55	4	3	5	5	5	5	27
56	4	4	5	4	4	4	25
57	4	5	2	3	5	3	22
58	5	5	5	5	5	5	30
59	4	5	5	4	5	5	28
60	4	4	4	4	4	4	24
61	4	4	4	4	4	4	24
62	4	5	5	4	4	5	27
63	4	4	4	4	4	4	24
64	4	5	5	4	4	5	27
65	5	5	5	5	5	4	29
66	5	5	5	4	4	5	28
67	4	4	4	5	4	4	25
68	4	5	5	4	4	5	27
69	5	5	5	4	4	5	28
70	5	4	5	5	4	5	28
71	4	4	4	4	4	4	24
72	5	5	4	5	5	5	29
73	4	4	5	4	4	4	25
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	4	5	4	5	4	26
76	3	3	4	4	4	4	22
77	3	3	4	4	3	4	21

78	4	4	4	4	4	4	24
79	5	5	5	5	5	5	30
80	4	4	4	4	4	4	24
81	5	5	5	5	5	5	30
82	4	4	5	5	5	5	28
83	3	3	3	4	3	5	21
84	4	4	5	5	4	5	27
85	4	4	4	4	4	4	24
86	5	5	5	5	5	5	30
87	3	4	4	4	4	4	23
88	4	4	4	4	4	4	24
89	5	5	5	5	5	5	30
90	5	5	5	5	5	5	30
91	4	4	4	4	4	4	24
92	4	4	4	4	4	4	24
93	5	5	5	5	5	5	30
94	4	4	4	4	4	4	24
95	5	4	5	4	4	4	26
96	4	4	4	4	4	4	24
97	4	4	5	4	5	5	27

No	Kualitas Lap Keu					TOTAL
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	25
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	4	4	4	4	20
6	4	4	4	4	4	20
7	5	5	5	5	5	25
8	4	4	4	4	4	20
9	5	4	5	5	5	24
10	5	5	4	4	5	23
11	4	5	4	5	5	23
12	4	4	4	5	4	21
13	5	5	5	5	5	25
14	5	5	5	4	5	24
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	4	4	4	20

17	4	5	4	4	4	21
18	5	5	5	5	4	24
19	5	4	5	5	5	24
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	5	5	25
23	5	5	4	4	4	22
24	5	5	4	4	5	23
25	5	4	4	5	5	23
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	4	4	4	22
28	5	5	4	4	4	22
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	5	4	5	5	5	24
32	4	5	4	5	4	22
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20
35	5	5	5	5	5	25
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	5	5	5	5	5	25
39	5	5	5	5	5	25
40	4	4	4	4	4	20
41	4	4	4	4	4	20
42	4	4	4	4	4	20
43	5	5	4	4	4	22
44	5	5	5	5	5	25
45	5	5	5	5	5	25
46	5	5	5	5	5	25
47	4	4	4	4	4	20
48	5	5	5	5	5	25
49	5	5	5	5	5	25
50	5	5	5	5	5	25
51	5	5	5	5	5	25
52	5	4	4	4	5	22
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	4	4	20
55	5	5	4	5	4	23
56	5	5	4	4	5	23
57	3	3	2	2	4	14

58	5	5	5	5	5	25
59	5	5	5	5	5	25
60	5	5	5	5	5	25
61	4	4	4	4	4	20
62	4	4	4	4	4	20
63	4	4	4	4	4	20
64	5	4	5	5	5	24
65	5	5	5	5	5	25
66	5	5	5	5	5	25
67	5	5	5	4	4	23
68	5	5	4	5	4	23
69	5	5	5	5	5	25
70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	5	4	5	22
73	5	5	5	5	5	25
74	4	4	4	4	4	20
75	4	4	4	4	4	20
76	4	4	4	4	4	20
77	4	4	4	4	4	20
78	4	4	4	4	4	20
79	5	5	5	5	5	25
80	4	4	4	4	4	20
81	5	5	5	5	5	25
82	5	5	5	5	5	25
83	4	4	3	3	3	17
84	4	4	4	4	4	20
85	4	4	4	4	4	20
86	4	4	4	4	4	20
87	4	4	4	4	4	20
88	4	4	4	4	4	20
89	5	5	5	5	5	25
90	5	5	5	5	5	25
91	5	5	5	5	5	25
92	4	4	4	4	4	20
93	5	5	5	5	5	25
94	4	4	4	4	4	20
95	4	4	4	4	4	20
96	4	4	4	4	4	20
97	5	4	4	4	4	21

No	Kinerja			TOTAL
	Y1	Y2	Y3	
1	5	5	5	15
2	5	5	4	14
3	4	4	5	13
4	5	5	5	15
5	4	5	5	14
6	4	4	4	12
7	4	4	5	13
8	5	5	5	15
9	5	5	5	15
10	4	4	4	12
11	4	5	5	14
12	5	5	5	15
13	5	5	5	15
14	5	5	5	15
15	5	5	5	15
16	4	4	4	12
17	4	4	5	13
18	5	5	5	15
19	5	5	5	15
20	5	4	4	13
21	4	4	4	12
22	4	4	4	12
23	5	5	5	15
24	5	5	5	15
25	5	4	5	14
26	4	4	5	13
27	4	5	5	14
28	5	5	4	14
29	4	4	4	12
30	4	4	4	12
31	4	4	5	13
32	5	5	5	15
33	5	5	5	15
34	4	4	4	12
35	5	5	5	15
36	4	4	4	12
37	5	5	5	15
38	5	5	5	15
39	5	5	5	15

40	5	5	4	14
41	4	5	4	13
42	4	4	5	13
43	5	5	5	15
44	5	5	5	15
45	5	5	5	15
46	5	5	5	15
47	5	4	4	13
48	5	5	5	15
49	5	5	5	15
50	5	5	5	15
51	4	5	5	14
52	5	5	5	15
53	4	4	5	13
54	5	5	4	14
55	4	3	5	12
56	4	4	4	12
57	3	4	4	11
58	5	5	5	15
59	5	5	5	15
60	5	4	4	13
61	5	5	5	15
62	5	5	5	15
63	4	4	4	12
64	5	5	4	14
65	5	5	5	15
66	5	5	5	15
67	5	4	4	13
68	5	4	4	13
69	5	5	5	15
70	5	5	4	14
71	5	5	5	15
72	5	5	5	15
73	5	5	5	15
74	5	5	5	15
75	4	5	5	14
76	4	4	4	12
77	4	4	4	12
78	4	4	4	12
79	5	5	5	15
80	4	4	4	12

Regulasi

No Instrumen Penelitian	T					Idx	Kriteria TCR
	STS	TS	N	S	SS	%	
1	0	0	4	43	50	89	Sedang
2	0	0	2	29	66	93	Tinggi
3	0	0	0	30	67	94	Tinggi
4	0	0	3	37	57	91	Tinggi
5	0	0	5	38	54	90,10	Sedang
Rata-rata						92	Tinggi

Faktor Politik

No Instrumen Penelitian	T					Idx	Kriteria TCR
	STS	TS	N	S	SS	%	
1	0	0	27	15	55	86	Sedang
2	0	0	29	10	58	86	Sedang
3	0	0	25	31	41	83	Rendah
4	0	0	0	57	40	88	Sedang
Rata-rata						86	Tinggi

Akuntabilitas

No Instrumen Penelitian	T					Idx	Kriteria TCR
	STS	TS	N	S	SS	%	
1	0	0	11	72	14	81	Rendah
2	0	2	8	66	21	82	Rendah

3	0	0	13	58	26	83	Rendah
4	0	0	3	65	29	85	Rendah
5	0	0	5	63	29	84,95	Rendah
Rata-rata						83	Rendah

Sistem Pengendalian Internal

No Instrumen Penelitian	T					Idx	Kriteria TCR
	STS	TS	N	S	SS	%	
1	0	0	6	55	36	86	Sedang
2	0	0	7	49	41	87	Sedang
3	0	1	1	49	46	89	Sedang
4	0	0	2	61	34	87	Sedang
5	0	0	1	53	43	89	Sedang
6	0	0	1	53	43	88,66	Sedang
Rata-rata						88	Sedang

Kualitas Laporan Keuangan

No Instrumen Penelitian	T					Idx	Kriteria TCR
	STS	TS	N	S	SS	%	
1	0	0	1	48	48	90	Sedang
2	0	0	1	52	44	89	Sedang
3	0	1	1	58	37	87	Sedang
4	0	1	1	55	40	88	Sedang
5	0	0	1	55	41	88	Sedang
Rata-rata						88	Sedang

Kinerja Pemerintah Daerah

No Instrumen Penelitian	T					Idx	Kriteria TCR
	STS	TS	N	S	SS	%	
1	0	0	1	35	61	92	Tinggi
2	0	0	1	35	61	92	Tinggi
3	0	0	0	35	62	93	Tinggi
Rata-rata						93	Tinggi

Lampiran 4

Hasil Pengujian

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent
Valid	Laki-laki	60	61,9
	Perempuan	37	38,1
	Total	97	100,0

Usia

		Frequency	Percent
Valid	36-45 tahun	19	19,6
	>46 tahun	78	80,4
	Total	97	100,0

Pend. Terakhir

		Frequency	Percent
Valid	D3	5	5,2
	S1	24	24,7
	S2	59	60,8
	S3	9	9,3
	Total	97	100,0

Latber Pend.

		Frequency	Percent
Valid	Akuntansi	11	11,3
	Manajemen	46	47,4
	Lainnya	40	41,2
	Total	97	100,0

Jabatan

		Frequency	Percent
Valid	Pimpinan	26	26,8
	Sekretaris	23	23,7
	Kabag/Kabid	8	8,2
	Kasubag/Kasubid	40	41,2
	Total	97	100,0

Lama Bekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	16-25 tahun	33	34,0	34,0	34,0
	>25 tahun	64	66,0	66,0	100,0
	Total	97	100,0	100,0	

CONVERGENT VALIDITY

	Kompetensi_	Akuntabilitas_	Faktor Politik_	Kinerja Pemerintah_	Kualitas Lap Keu	Regulasi_	Sistem Pengendalian Internal_
X1.1	0,889						
X1.2	0,883						
X1.3	0,868						
X1.4	0,869						
X1.5	0,876						
X2.1						0,840	
X2.2						0,833	
X2.3						0,881	
X2.						0,88	

4						0	
X2. 5						0,82 3	
X3. 1			0,881				
X3. 2			0,886				
X3. 3			0,890				
X3. 4			0,892				
X4. 1		0,912					
X4. 2		0,926					
X4. 3		0,890					
X4. 4		0,909					
X4. 5		0,880					
X5. 1							0,853
X5. 2							0,864
X5. 3							0,867
X5. 4							0,869
X5. 5							0,825
X5. 6							0,859
Y1				0,867			
Y2				0,881			
Y3				0,827			
Z1					0,835		
Z2					0,817		
Z3					0,857		
Z4					0,825		
Z5					0,836		

DISCRIMINANT VALIDITY

Heterotrait-
Monotrait
Ratio (HTMT)

	Kompetensi_	Akuntabilitas_	Faktor Politik_	Kinerja Pemerintah_	Kualitas Lap Keu	Regulasi_	Sistem Pengendalian Internal_
Kompetensi_							
Akuntabilitas_	0,977						
Faktor Politik_	0,791	0,851					
Kinerja Pemerintah_	0,850	0,769	0,666				
Kualitas Lap Keu	0,811	0,765	0,749	0,811			
Regulasi_	0,689	0,798	0,834	0,619	0,745		
Sistem Pengendalian Internal_	0,689	0,669	0,894	0,730	0,813	0,631	

COMPOSITE RELIABILITY

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability
Kompetensi_	0,925	0,925	0,943
Akuntabilitas_	0,944	0,944	0,957
Faktor Politik_	0,910	0,910	0,937
Kinerja Pemerintah_	0,821	0,823	0,894
Kualitas Lap Keu	0,891	0,892	0,920
Regulasi_	0,905	0,907	0,930
Sistem Pengendalian Internal_	0,927	0,927	0,943

AVERAGE VARIANCE EXTRACTED

	Average Variance Extracted (AVE)
Kompetensi_	0,769
Akuntabilitas_	0,816
Faktor Politik_	0,787
Kinerja Pemerintah_	0,737
Kualitas Lap Keu	0,696
Regulasi_	0,726
Sistem Pengendalian Internal_	0,733

COEFFICIENT OF DETERMINATION

	R Square	R Square Adjusted
Kinerja Pemerintah_	0,954	0,951
Kualitas Lap Keu	0,961	0,958

UJI HIPOTESIS

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kompetensi_ -> Kinerja Pemerintah_	0,118	0,117	0,056	2,102	0,036
Akuntabilitas_ -> Kinerja Pemerintah_	0,089	0,092	0,042	2,123	0,034
Faktor Politik_ -> Kinerja Pemerintah_	0,113	0,112	0,053	2,121	0,034
Regulasi_ -> Kinerja Pemerintah_	0,225	0,232	0,093	2,429	0,015
Sistem Pengendalian Internal_ -> Kinerja Pemerintah_	0,133	0,137	0,058	2,286	0,023

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation	T Statistics (O/STDEV)	P Values
--	---------------------	-----------------	--------------------	--------------------------	----------

			(STDEV)		
Kompetensi_ -> Kualitas Lap Keu_ -> Kinerja Pemerintah_	0,144	0,144	0,041	3,507	0,000
Akuntabilitas_ -> Kualitas Lap Keu_ -> Kinerja Pemerintah_	0,086	0,087	0,042	2,055	0,040
Faktor Politik_ -> Kualitas Lap Keu_ -> Kinerja Pemerintah_	0,114	0,112	0,046	2,481	0,013
Regulasi_ -> Kualitas Lap Keu_ -> Kinerja Pemerintah_	0,517	0,524	0,067	7,727	0,000
Sistem Pengendalian Internal_ -> Kualitas Lap Keu_ -> Kinerja Pemerintah_	0,171	0,170	0,061	2,808	0,005

Lampiran 5

Surat-surat

 **PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Durian, Sanggrahan, Wonogiri 57612
Telepon (0273)325373, Faksimile (0273)325373
Surel : kesbangpolwng@gmail.com, Laman :http://www.kesbangpol.wonogirikab.go.id

Wonogiri, 26 April 2023

Nomor : 071/ 336
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan
**Rekomendasi
Penelitian.**

Kepada:
Yth. Terlampir.

Di -
WONOGIRI

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan, bersama ini disampaikan rekomendasi Nomor :/2021/...../124..... Tanggal 26 April 2023 Atas nama JIHAN FADIYAH SAFITRI, dengan judul :

Pengaruh Kompetensi, Regulasi, Faktor Politik, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Mediasi.

untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Demikian untuk menjadi maklum dan disampaikan terima kasih.

An. BUPATI WONOGIRI
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


HAHMAT IMAN SANTOSA, S.Sos., MP.
Pembina Tk. I
NIP. 19681224199003 1 003

Tembusan, Kepada Yth.
1. Bupati Wonogiri, sebagai laporan;
2. Dekan FEB UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Yang Bersangkutan.

CS Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Durian, Sanggrahan, Wonogiri 57612
Telepon (0273)325373, Faksimile (0273)325373

Surel : kesbangpolwng@gmail.com, Laman :<http://www.kesbangpol.wonogirikab.go.id>

LAMPIRAN

- 1 . Sekretaris Daerah Kab. Wonogiri,
- 2 . Sekretaris DPRD Kab. Wonogiri,
- 3 . Direktur RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri,
- 4 . Inspektur Kab. Wonogiri,
- 5 . Kepala BKD Kab. Wonogiri,
- 6 . Kepala BAPPEDA dan Litbang Kab. Wonogiri,
- 7 . Kepala BPKD Kab. Wonogiri,
- 8 . Kepala Dinas P dan K Kab. Wonogiri,
- 9 . Kepala DISPORAPAR Kab. Wonogiri,
- 10 . Kepala DINKES Kab. Wonogiri,
- 11 . Kepala DINSOS Kab. Wonogiri,
- 12 . Kepala Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri,
- 13 . Kepala DISDUKCAPIL Kab. Wonogiri,
- 14 . Kepala Dinas PMD Kab. Wonogiri,
- 15 . Kepala DPMPSTP Kab. Wonogiri,
- 16 . Kepala Dinas KUKM dan Perindag Kab. Wonogiri,
- 17 . Kepala DISNAKER Kab. Wonogiri,
- 18 . Kepala DISKOMINFO Kab. Wonogiri,
- 19 . Kepala DISPORA dan KPP Kab. Wonogiri,
- 20 . Kepala DPU Kab. Wonogiri,
- 21 . Kepala DISHUB Kab. Wonogiri,
- 22 . Kepala Dinas LH Kab. Wonogiri,
- 23 . Kepala DISPERTAN dan Pangan Kab. Wonogiri,
- 24 . Kepala DISLAPERNAK Kab. Wonogiri,
- 25 . Kepala Dinas Kearsipan Kab. Wonogiri,
- 26 . Kepala SATPOL PP Kab. Wonogiri,



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dunan, Sanggrahan, Wonogiri 57612
Telepon (0273)325373, Faksimile (0273)325373
Surel : kesbangpolwng@gmail.com, Laman : http://www.kesbangpol.wonogirikab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/ 184

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Memperhatikan :

- Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univ. Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Nomor : B-1006/Un.20/F.IV.1/PP.00.9/04/2023, Tanggal 14 April 2023

Bupati Wonogiri Melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonogiri, **memberikan rekomendasi** kepada :

1. Nama : **JIHAN FADIYAH SAFITRI**
2. Alamat : Bener, RT 025 / RW 008, Bener, Ngrampal, Sragen.
3. No.Telp dan Email : 085601610344/jihan.jfs@gmail.com
4. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melakukan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul : **Pengaruh Kompetensi, Regulasi, Faktor Politik, Akuntabilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Mediasi.**
- b. Tempat/Lokasi : Terlampir
- c. Bidang : Ekonomi dan Bisnis
- d. Waktu : 26 April s/d 26 Juni 2023
- e. Penanggung Jawab : Dr. Awan Kostrad Diharto, SE.,M.Ag.
- f. Status : Baru
- g. Anggota : -
- h. Nama Lembaga : Univ. Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
- i. Jenis : **Skripsi**
- j. Keterangan : **Mematuhi Protokol Kesehatan**

KETENTUAN YANG HARUS DITAATI ADALAH :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Pelaksanaan penelitian/kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
3. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan;
4. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban;
5. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemohon rekomendasi tidak mentaati/mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
6. Setelah pelaksanaan penelitian/kegiatan dimaksud selesai, supaya menyerahkan hasilnya berupa **hard copy dan soft copy** kepada Bupati Wonogiri Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu dapat diajukan kembali kepada instansi pemohon dengan menyertakan surat pengantar yang telah diperbarui.
8. Mentaati Protokol Kesehatan disaat Pandemi Covid-19

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Wonogiri, 26 April 2023

AN BUPATI WONOGIRI
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK





PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Durian, Sanggrahan, Wonogiri 57612
Telepon (0273)325373, Faksimile (0273)325373

Surel : kesbangpolwng@gmail.com, Laman : <http://www.kesbangpol.wonogirikab.go.id>

LAMPIRAN LOKASI

- 1 . Setda Kab. Wonogiri,
- 2 . Sekretariat DPRD Kab. Wonogiri,
- 3 . RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri,
- 4 . Inspektorat Kab. Wonogiri,
- 5 . BKD Kab. Wonogiri,
- 6 . BAPPEDA dan Litbang Kab. Wonogiri,
- 7 . BPKD Kab. Wonogiri,
- 8 . Dinas P dan K Kab. Wonogiri,
- 9 . DISPORAPAR Kab. Wonogiri,
- 10 . DINKES Kab. Wonogiri,
- 11 . DINSOS Kab. Wonogiri,
- 12 . Dinas PPKB dan P3A Kab. Wonogiri,
- 13 . DISDUKCAPIL Kab. Wonogiri,
- 14 . Dinas PMD Kab. Wonogiri,
- 15 . DPMPSTP Kab. Wonogiri,
- 16 . Dinas KUKM dan Perindag Kab. Wonogiri,
- 17 . DISNAKER Kab. Wonogiri,
- 18 . DISKOMINFO Kab. Wonogiri,
- 19 . DISPERA dan KPP Kab. Wonogiri,
- 20 . DPU Kab. Wonogiri,
- 21 . DISHUB Kab. Wonogiri,
- 22 . Dinas LH Kab. Wonogiri,
- 23 . DISPERTAN dan Pangan Kab. Wonogiri,
- 24 . DISLAPERNAK Kab. Wonogiri,
- 25 . Dinas Kearsipan Kab. Wonogiri,
- 26 . SATPOL PP Kab. Wonogiri,

Lampiran 6

Pendukung





















DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Jihan Fadiyah Safitri
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 27 Desember 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Bener RT/RW 025/008, Bener, Ngrampal
5. Agama : Islam
6. Nomor Telepon : 085601610344
7. Email : jihan.jfs@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tk PTPN Kerjo Arum
2. SD N Gabungan 1
3. SMP N 1 Tanon
4. SMA N 1 Suokodono
5. UIN Raden Mas Said Surakarta